

**ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Ekonomi Pembangunan*

Oleh :

**HASNATHUL KHAIR**

**NPM : 1405180039**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

#### MEMUTUSKAN

Nama : HASNATHUL KHAIIR  
N P M : 1405180039  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI INDONESIA  
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

#### TIM PENGUJI

Penguji I

MUKMIN POHAN, S.E., M.Si

Penguji II

HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si

Pembimbing

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

#### PANITIA UJIAN

Setua

  
AJI PRIYAWAN, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

  
ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini disusun oleh :

Nama : HASNATHUL KHAIR  
N.P.M : 1405180039  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Skripsi : ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI INDONESIA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hasnathul Khair  
NPM : 1405180039  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Ekonomi Pembangunan)  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
  - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
  - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, ..... 2018

Pembuat Pernyataan

  
6000  
RUPIAH  
Hasnathul Khair

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi

## ABSTRAK

### **HASNATHUL KHAIR. NPM 1405180039. ANALISIS KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI INDONESIA.**

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat judul “**Analisis Karakteristik Kemiskinan di Indonesia**”. Topik ini diangkat berdasarkan fenomena yang terjadi dalam perekonomian di Indonesia. Bahwasanya di Indonesia masih banyak penduduk miskin sehingga masih banyak ketimpangan yang terjadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk melakukan analisis deskriptif dalam melihat bagaimana serta seberapa besar perkembangan karakteristik kemiskinan di Indonesia, serta bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data panel, dimana data yang dihimpun adalah data *cross section* adalah seluruh provinsi yang ada di Indonesia sedangkan data *time series* yang digunakan dalam penelitian ini ialah dihimpun sebanyak 4 tahun, yaitu mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Hasil analisis dalam penelitian saya ialah bahwasanya jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan sebaliknya dengan indeks keparahan kedalaman kemiskinan di Indonesia.

Dengan menggunakan metode penelitian berupa data *time series* yaitu dengan memberikan paparan atau penjelasan terhadap teori-teori yang berhubungan dengan judul. Penelitian ini menjelaskan tentang kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Hasil penelitian menyatakan bahwa daerah yang dapat dikatakan daerah yang maju adalah daerah atau provinsi yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pemerintah, memiliki fasilitas umum yang memadai dalam berbagai seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta sarana dan prasarana dalam menunjang kelancarannya jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Kata Kunci : *Kemiskinan dan Ketimpangan.*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah member kesehatan, kesabaran serta kekuatan dan tak lupa pula Shalawat bernadakan salam kepad Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang sepert isaat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul: “**Analisis Karakteristik Kemiskinan Di Indonesia**“, yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terwujudnya skripsi ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugasnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan segala kerendahan hati kepada:

1. Terimakasih kepada Orangtua tercinta yang telah memberidukungan dan semangatnya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
2. Abang, kakak dan adik tercinta yang telah membantu dan mendoakan serta memacu semangat penulis sehingg aterselesainya skripsi ini.
3. Bapak Drs. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak H. Januari, S.E., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Prawidya Hariani M,Si selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Drs. Hj. LailanSafina Hsb M,Si, selaku Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
7. Seluruh Staf Biro Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Terima kasih kepada Sahabat-Sahabat Tercinta, Fauziah Nurina, dan Aizkah Syafira yang tidak pernah lelah memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Sahabat-Sahabat Tercinta seperjuang skripsi, Octavianni Mardiyanty Ritonga, Ruriansyah Harahap, dan Desi Ardila yang selalu mengingatkan, membantu dan mendorong penulis serta memberi semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman kelas dari EP B-Siang yang telah member dukungan dan semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk Sahabat-Sahabat Tercinta, Indah Dwi Lestari, Indah Apriyani Nst, Hartati Tammamah Lbs, Sofi Audityas, Yuli Novita, Deri Yanti, yang selalu memberikan semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih untuk Kawan-Kawan Se-permainan, Vahrezy Assyafid Sadik, Ridho Onanda Koto, Rezi Aldi, Okri Alfiandi Arif, dan M. Bukhori Tarigan yang telah memberikan semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu, psenulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan apabila dalam penulisan terdapat kata-kata yang kurang berkenan penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

HASNATHUL KHAIR

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB 1</b>	
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Identifikasi Masalah .....	15
3. Batasan Masalah .....	16
4. Rumusan Masalah .....	16
5. Tujuan Masalah .....	16
6. Manfaat Penelitian.....	16
1. Akademik .....	17
2. Non akademik .....	17
<b>BAB II</b>	
<b>LANDASAN TEOR.....</b>	<b>18</b>
<b>A. Uraian Teori.....</b>	<b>18</b>
1. Teori Pembangunan Ekonomi .....	18
a. Produk Domestik Bruto.....	21
b. Pendapatan Perkapita .....	22
c. Indeks Pembangunan Manusia .....	24
d. Urbanisasi .....	27
2. Pertumbuhan Ekonomi .....	28
a. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	28
Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith.....	29
Teori Pertumbuhan Neo-Klassik Yoseph S .....	31
Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod Domar.....	32
Teori Pertumbuhan Ekonomi Rustow .....	33
Teori Pertumbuhan Ekonomi Kuznetz .....	34
Teori Pertumbuhan Ekonomi (Solow dan Swan) .....	35
Teori Pertumbuhan David Ricardo .....	36
b. Kemiskinan .....	37
Kemiskinan Absolut .....	40
Kemiskinan Relatif .....	40
Kemiskinan kultural.....	41
c. Sebab-sebab terjadinya kemiskinan .....	41
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>43</b>
<b>C. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>44</b>
<b>Bab III</b>	
<b>METODE PENDAHULUAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	45
B. Defenisi Operasional .....	45
C. Tempat Waktu Penelitian .....	46

	D. Jenis dan Sumber Data .....	46
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
	F. Tahapan Analisis .....	47
	a. Analisis Deskriptif .....	47
	b. Analisis Tipologi Klassen .....	47
<b>Bab IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Letak Geografis Indonesia .....	48
	B. Analisis Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia .....	54
	C. Analisis Karakteristik Kemiskinan di Indonesia .....	61
	D. Analisis Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Indonesia .....	62
	E. Analisis Tipologi Klassen .....	65
<b>Bab V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>68</b>
	A. Kesimpulan .....	68
	B. Saran .....	65
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia .....	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Provinsi .....	4
Tabel 1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia .....	7
Tabel 1.4 Gini Ratio .....	10
Tabel 2.1 Pwnwlitian Terdahulu .....	43
Tabel 3.2 Definisi Terdahulu .....	45
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Indonesia .....	51
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan .....	53
Tbel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi .....	57
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan .....	61
Tabel 4.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia .....	64

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin .....	3
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan .....	6
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskina .....	40
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Indonesia .....	50
Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk .....	53
Gambar 4.3 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi .....	56
Gambar 4.4 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia .....	59
Gambar 4.5 Indek Kedalaman Kemiskinan di Indonesia .....	62
Gambar 4.6 Tipologi Klassen .....	65

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan menyebabkan efek yang hampir sama di setiap negara. Kemiskinan juga merupakan fenomena sosial-ekonomi yang tidak hanya melintas batas agama, tetapi juga suku dan kebangsaan. Karakteristik utamanya adalah rendahnya dan terbatasnya aksesibilitas dalam pemenuhan kebutuhan baik pangan, sandang, papan, maupun pendidikan, kesehatan dan hiburan. Akibat dari gejala sosial tersebut yaitu : (1) hilangnya kesejateraan dari kalangan miskin (sandang, pangan, dan papan), (2) tersingkir dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, (3) kehilangan hak atas perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, hak atas partisipasi terhadap pemerintah dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, hak untuk berinovasi, dan untuk kebebasan hidup. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh 2 aspek antara lain : aspek makro (produk domestik bruto dan jumlah penduduk) dan aspek mikro (pendapatan rumah tangga, ukuran keluarga, dan jumlah anggota rumah tangga yang berpenghasilan).

Untuk dapat memberantas kemiskinan, diperlukan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Kebijakan yang efektif dapat dibangun bila terdapat landasan berupa informasi yang akurat mengenai kondisi masyarakat miskin, yang dapat diperoleh dari profil kemiskinan. Mengetahui faktor-faktor yang memiliki korelasi kuat dengan kemiskinan dapat menjadi landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan di masa depan khususnya untuk Indonesia.

Kemiskinan timbul karena kurangnya pendapatan atau tidak mampu berpendidikan, memiliki kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak percaya diri, dan tidak mempunyai fasilitas untuk mengemukakan sebuah pendapat. Pandangan ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi.

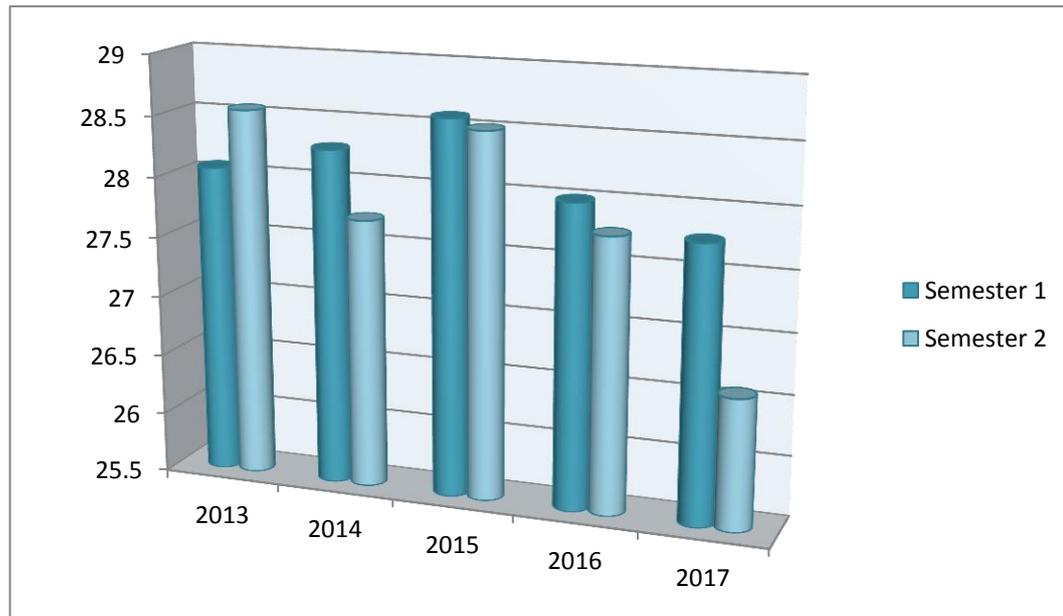
Untuk dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan, diperlukan penjelasan yang komprehensif mengenai mengapa seseorang miskin, serta sektor apa saja yang memiliki korelasi kuat dengan kemiskinan. Penjelasan mengenai mengapa seseorang hidup dalam kemiskinan sangat penting untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Beberapa penyebab utama yang dianggap memiliki hubungan erat dengan kemiskinan terkaitnya antara lain;

- (1) karakteristik wilayah
- (2) karakteristik masyarakat
- (3) serta karakteristik rumah tangga dan
- (4) karakteristik individu.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang tentu saja memiliki cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat taraf hidup masyarakat (sesuai UUD 45: alenia IV), maka pembangunan perekonomian harus ditingkakan dan dilaksanakan secara maksimal. Setiap pembangunan walaupun sekecil apa pun pasti memerlukan dana apalagi membangun perekonomian negara sebesar Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 220 jiwa lebih.

Untuk dapat melihat perkembangan penduduk miskin di Indonesia maka kita dapat melihat jumlah penduduk miskin ditahun 2013-2017 yang disajikan sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2013-2017 (Ribu Jiwa)**



Sumber: BPS, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Pada tabel 1.1 diatas, jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Dari tahun 2013-2017 menunjukkan hasil positif karena jumlah penduduk miskin semakin menurun setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya.

Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain, tingkat pendidikan masyarakat, pendapatan, pengangguran, geografis, karakter, sosial dan budaya, serta faktor lain yang mempengaruhi. Fenomena tersebut dapat ditemukan dengan mudah hampir di setiap sudut wilayah, baik perdesaan, maupun perkotaan.

Ketidakmeratannya kesejahteraan di Negara Indonesia menyebabkan diberbagai macam Provinsi di Indonesia memiliki tingkat penduduk yang masih dapat dikatakan tergolong dalam kelompok miskin.

Adapun jumlah penduduk miskin dari tahun 2013 sampai dengan 2015 selama 2 semester disajikan dalam gambar sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2013-2017**

No.	Tahun	Semester 1	Semester 2
1.	2013	28,066.60	28,553.93
2.	2014	28,280.01	27,727,78
3.	2015	28,592.79	28,513.57
4.	2016	28,005.39	27,764.32
5.	2017	27,771.22	26,582.99

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dan adapun jumlah penduduk miskin di Provinsi Indonesia yang memiliki penduduk miskin terbesar di Indonesia disajikan dalam gambar sebagai berikut berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017**

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	847	857	855	844	850
Sumatera Utara	1,365	859	1,485	1,452	1,389
Sumatera Selatan	1,109	1,092	1,128	1,098	1,086
Lampung	1,148	1,142	1,131	1,54	1,107
Jawa Barat	4,340	4,282	4,46	4,47	3,97
Jawa Tengah	4,718	4,670	4,541	4,499	4,323
<b>Jawa Timur</b>	<b>4,818</b>	<b>4,767</b>	<b>4,782</b>	<b>4,670</b>	<b>4,511</b>
Nusa Tenggara Timur	497	992	1,159	1,149	1,142
Sulawesi Selatan	822	835	830	801	819
Papua	2,074	1,149	878	912	903

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, angka kemiskinan tertinggi di sumbangkan oleh Provinsi Jawa Timur. Menurut data BPS, kurang lebih 4.511.000 juta jiwa penduduk miskin terdapat di Jawa Timur. Berdasarkan laporan BPS, Jawa Timur

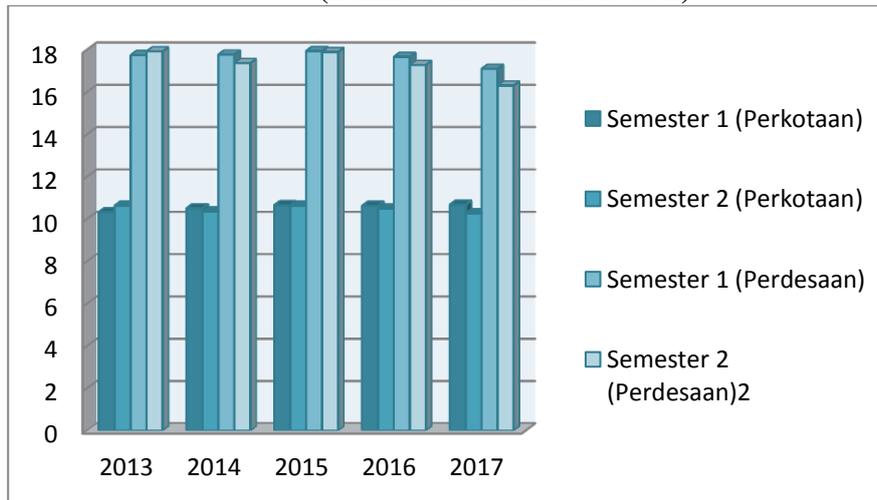
adalah Provinsi yang menyumbangkan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 4,5 juta jiwa.

Pada tahun 2015, BPS (Badan Pusat Statistik) merilis pernyataan bahwa pengaruh penduduk Pulau Jawa tergolong miskin. Dari hasil data penduduk miskin tersebut, Jawa Timur ada di urutan pertama Provinsi yang menyumbang angka kemiskinan terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 4,5 juta jiwa penduduk miskin. Lebih dari 3,2 juta penduduk berada di pedesaan dan 1,5 juta jiwa berada di kota-kota besar.

Jawa Timur merupakan sebuah provinsi di bagian Timur Pulau Jawa, Indonesia dengan Ibu Kotanya yang terletak di Surabaya. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 Provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Walaupun Jawa Timur bukan termasuk daerah terbelakang seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, serta tingkat kontribusi perekonomian di Jawa Timur juga terbilang tinggi, namun Jawa Timur menjadi sarang bagi penduduk miskin di Indonesia.

Penduduk miskin di Indonesia berada di dua daerah antara lain di daerah perkotaan dan pedesaan, untuk dapat melihat jumlah penduduk miskin menurut Provinsi dalam bentuk Pedesaan dan Perkotaan yang disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 2013-2017**  
**(Perkotaan dan Perdesaan)**



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Jika dilihat dari Gambar 1.2 Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah berkurangnya angka kemiskinan. Pada tabel 1.2 diatas, jumlah penduduk miskin di Indonesia dilihat berdasarkan perkotaan/perdesaan terus mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Dari tahun 2013-2017 menunjukkan hasil positif karena jumlah penduduk miskin dalam Tahun 2017 akhir menunjukkan hasil yang positif atau berkurangnya jumlah penduduk miskin. Namun dapat dilihat dari tabel diatas, tingkat kemiskinan yang dapat dikatakan tinggi berada di daerah Indonesia bagian perdesaan dengan jumlah penduduk miskin hampir mencapai 16,31%.

Angka kemiskinan penduduk perdesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan perkotaan. Data menunjukkan bahwa penduduk miskin desa pada Maret 2017 masih mencapai 16,31%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan yang hanya 10,27%.

Sejak 2015, pemerintah menggelirkan dana triliunan rupiah untuk program Dana Desa untuk mengatasi kesejangan antara penduduk desa dan kota. Pada

tahun 2015, pemerintah menganggarkan Rp. 20 Triliun, pada Tahun 2016 sebesar Rp.47 Triliun, dan Tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.60 Triliun. Namun sayangnya, dana desa yang disalurkan ke daerah banyak yang seharusnya untuk pembangunan desa ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok pemerintah, sehingga banyak pejabat daerah yang tersangkut kasus korupsi dana desa. Sistem dan sumber daya yang belum siap serta kurangnya pengawasan membuat anggaran Dana Desa banyak yang tidak tepat sasaran.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun, pada kenyataan meski jumlah penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan justru meningkat. Berikut Indeks Kedalam Kemiskinan di Indonesia yang disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Provinsi 2013-2017**

Provinsi	Perkotaan+perdesaan									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2
Aceh	3.13	3.20	2.91	3.14	3.10	3.11	3.48	3.06	2.98	2.92
Sumut	1.54	1.72	1.47	1.71	1.65	1.89	1.77	1.96	1.71	1.50
SumBar	1.01	1.27	0.94	0.75	0.98	1.26	1.10	1.12	1	0.99
Riau	1.18	1.18	1.01	1.20	1.38	1.45	1.36	1.36	1.32	0.96
Jambi	0.99	1.12	1.05	1.12	1.42	1.60	1.47	1.42	1.28	0.99
Sumsel	2.08	2.49	2.25	2.41	2.46	1.88	2.02	1.96	2.24	2.40
Bengkulu	3	3.24	2.78	2.85	3.48	3.63	3.14	2.79	2.85	2.76
Lampung	2.27	2.23	2.23	2.30	2.36	2.36	2.63	1.92	2.16	2.11
Kep.B.Belitung	0.54	0.62	0.73	0.60	0.67	0.90	0.67	0.75	0.49	0.56
Kep.Riau	0.69	1.02	0.94	0.74	0.97	0.86	0.89	0.71	0.97	1.18
Jakarta	0.63	0.39	0.39	0.60	0.52	0.27	0.46	0.43	0.49	0.61
Jawa Barat	1.32	1.65	1.52	1.39	1.63	1.67	1.49	1.28	1.45	1.39
Jawa Tengah	2.21	2.37	2.25	2.09	2.44	2.17	2.37	2.12	2.21	2.11

Yogyakarta	2.40	2.13	2.19	2.35	2.93	2.32	2.30	1.75	2.19	2.09
Jawa Timur	1.84	2.07	1.85	1.86	2.06	2.13	1.99	1.95	1.87	2.09
Banten	0.70	1.02	0.83	0.79	0.94	0.90	0.80	0.76	0.86	0.78
Bali	0.47	0.70	0.42	0.86	0.66	1.13	0.51	0.53	0.68	0.55
NTB	2.74	2.72	2.56	2.92	3.25	2.72	3	2.63	3.13	2.63
<b>NTT</b>	<b>3.39</b>	<b>3.04</b>	<b>3.34</b>	<b>3.25</b>	<b>4.06</b>	<b>4.62</b>	<b>4.69</b>	<b>3.83</b>	<b>4.34</b>	<b>4.16</b>
KalBar	1.19	1.30	0.98	1.26	1.29	1.09	1.30	1.13	1.23	1.02
KalTeng	0.86	0.61	0.75	0.97	0.89	1.02	0.86	0.65	0.84	0.84
KalSel	0.53	1.25	0.63	0.65	0.74	0.98	0.71	0.69	0.72	0.74
KalTim	0.83	1.25	1.08	0.79	0.90	0.69	1.04	0.81	0.89	0.87
KalUt	-	-	-	-	0.79	0.70	0.78	0.88	1.21	1.32
SulUt	1.18	1.16	1.21	1.28	1.34	1.54	1.53	1.38	1.37	1.30
SulTeng	3.09	2.28	2.18	2.11	2.52	2.37	2.72	2.28	2.55	2.80
SulSel	1.67	1.65	1.56	1.41	1.69	1.58	1.83	1.53	1.72	1.92
SulTenggara	2.12	1.83	1.99	2.09	2.64	2.05	2.76	1.98	1.87	2.09
Gorontalo	3.18	3.22	3.29	3.13	3.97	3.04	4.12	2.79	3.68	3.31
SulBar	1.89	1.30	1.44	1.94	1.93	1.54	1.95	1.85	1.88	1.81
<b>Maluku</b>	<b>3.88</b>	<b>3.52</b>	<b>3.80</b>	<b>4.11</b>	<b>3.52</b>	<b>4.79</b>	<b>3.63</b>	<b>3.76</b>	<b>3.50</b>	<b>3.41</b>
Maluku Utara	0.78	0.89	1.10	1.16	0.70	1.15	0.73	0.92	0.81	0.81
<b>Papua Barat</b>	<b>6.35</b>	<b>5.89</b>	<b>6.20</b>	<b>5.92</b>	<b>6.24</b>	<b>5.29</b>	<b>7.21</b>	<b>6.28</b>	<b>6.74</b>	<b>7.41</b>
Papua	6.89	6.56	6.84	6.42	8.82	0.85	9.37	7.44	7.50	1.79
Indonesia	1.75	1.89	1.75	1.75	1.97	1.84	1.94	1.74	1.83	1.79

*Sumber; Badan Pusat Statistik (BPS)*

Indeks kedalaman kemiskinan dalam bentuk perkotaan dan perdesaan pada Maret 2013 sebesar 1,75 dalam kurun waktu 2 tahun pada Maret 2015 naik sebesar 1,97. Dapat dikatakan bahwa indeks kedalaman kemiskinan dalam setiap tahunnya menunjukkan hasil yang negatif. Namun di Maret 2017 indeks kedalaman kemiskinan menurun menjadi 1.83 dan di September 2017 menjadi 1.79. dapat dikatakan dalam waktu 5 tahun indeks kedalaman menunjukkan penurunan.

Jika dilihat dari tabel diatas, provinsi yang mengalami tingkat kedalaman kemiskinan terparah adalah antara lain:

1. Papua dengan jumlah kedalaman kemiskinan sebesar 7,41
2. Nusa Tenggara Timur dengan jumlah kedalaman kemiskinan sebesar 4,16.
3. Maluku dengan jumlah kedalaman kemiskinan sebesar 3,41.

Provinsi diatas dapat dilihat dari kedalaman kemiskinan dengan jumlah yang paling tinggi yang dimiliki Indonesia.

Kenaikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan terjadi karena tiga hal, yaitu:

- Garis kemiskinan didesa yang lebih tinggi dari perkotaan
- Distribusi makanan dari kota ke desa yang jaraknya cukup jauh. Hal tersebut menyebabkan adanya margin dalam perdagangan yang lebih besar.
- Masyarakat perdesaan membeli barang-barang yang dipasarkan dikota dalam bentuk eceran. Hal tersebut menyebabkan harga yang diterima masyarakat perdesaan jauh lebih mahal.

Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Ketimpangan pendapatan umumnya diukur menggunakan rasio gini (Gini Ratio). Rasio Gini menggambarkan seberapa ahli dan merata pendapatan terdistribusi di masyarakat. Rasio gini berkisar dari 0-1. Apabila rasio gini mendekati 0 berarti cenderung terjadi pemerataan pendapatan, apabila mendekati 1 berarti cenderung ketimpangan pendapatan.

Tingkat ketimpangan di Indonesia relatif tinggi dan naik lebih pesat dibandingkan banyak negara Asia Timur lainnya. Sebuah survei persepsi masyarakat pada tahun 2013 mengenai ketimpangan menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di masyarakat Indonesia “Sangat Tidak Merata” atau “Tidak Setara Sama Sekali”. Para responden juga menuntut pemerintah untuk bertindak. Bila tidak ada tindakan, konsekuensi bagi Indonesia bisa mengancam. Pertumbuhan ekonomi dan pengetasan kemiskinan dapat melambat, disertai

naiknya resiko konflik. Lebih dari 61% responden mengatakan bahwa merka dapat menerima pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah asalkan jetimpangan juga berkurang. (Worldbank).

Untuk dapat melihat lebih jelas perkembangan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama 10 tahun dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**Gini Ratio Indonesia 2008-2017**

Tahun	Semester 1	Semester 2
2008	0,368	-
2009	0,367	-
2010	0,378	-
2011	0,410	0,388
2012	0,410	0,413
2013	0,413	0,406
2014	0,406	0,414
2015	0,408	0,402
2016	0,397	0,394
2017	0,393	0,391

*Sumber; Badan Pusat Statistik (BPS)*

Dalam tabel 1.4 diatas dapat disimpulkan bahwa, Gini Ratio dalam 10 tahun terakhir dapat dikatakan mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Pada tahun 2008 sebesar 0,368 dan di tahun 2010 mengalami peningkatan dalam ketimpangan pendapatan sebesar 0.378. Dan di tahun 2013 nilai ketimpangan pendapatan terus menaik hingga mencapai 0,413 disemester 1 dan disemester 2 mengalami penurunan sebesar 0,07% dalam 6 bulan terakhir. Selama 10 tahun terakhir 2013 mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan yang sangat tinggi. Dan di tahun 2017 nilai ketimpangan pendapatan menurun hingga 0,391. Dari kurun waktu 10 tahun, Indonesia mengalami fluktuasi tiap tahunnya dalam peningkatan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Salah satu acuan tingkat kemiskinan di Indonesia yang sampai sekarang tidak dapat diatasi adalah *Ketidakmerataan Penduduk, Tingkat Infrastruktur, Tingkat pendidikan dan Kesehatan* adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia yang ada di Indonesia.

#### ✓ **Ketidakmerataan Penduduk di Indonesia**

Hasil sensus penduduk menunjukkan pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa. Dengan proyeksi penduduk hingga tahun 2035 diperkirakan sebanyak 305.652.400 jiwa. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara terbesar dan terpadat keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Faktanya ketidakmerataannya penduduk dapat dilihat di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau yang paling banyak dijadikan tujuan migrasi (perpindahan penduduk). Padahal, dari keseluruhan luas wilayah Indonesia pulau Jawa hanya memiliki luas 6,8% ternyata dihuni oleh penduduk sebesar 57,5% penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan Pulau Sumatera yang memiliki luas sebesar 25,2% dari luas wilayah Indonesia, pulau Sumatera hanya dihuni oleh 21,3% penduduk. Maka dapat dikatakan ketidakmerataannya penduduk di Indonesia tidaklah seimbang.

Dengan demikian, Pulau Jawa berada di posisi teratas sebagai pulau dengan jumlah penduduk terbanyak dan terpadat se-Indonesia. Hal tersebut lama-kelamaan dirasa menjadi tanggungan yang cukup berat bagi Pulau Jawa dikarenakan daya dukung lingkungannya yang akan terus menerus mengalami penurunan.

Salah satu yang menjadi alasan kuat dalam pertimbangan seseorang dengan bermigrasi ke Pulau Jawa merupakan Infrastruktur. Dimana Infrastruktur merupakan faktor utama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan para investor lebih tertarik berinvestasi pada daerah-daerah yang memiliki pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga dapat mengembangkan potensi daerah tersebut secara maksimal.

#### ✓ **Infrastruktur di Indonesia**

*Infrastruktur* yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu penghambat perekonomian. Lambatnya pembangunan infrastruktur dapat ditandai dengan kurangnya kualitas dan kuantitas infrastruktur atau prasarana. Baik infrastruktur “keras” (yang merujuk kepada fisik; seperti jalan, bandara, pelabuhan dan lain-lain) maupun infrastruktur “non-fisik” (seperti; pasokan listrik, kesejahteraan sosial dan kesehatan). Indonesia tampaknya memiliki kesulitan untuk mendorong pengembangan struktural dengan cara cepat agar dapat meningkatkan perekonomian di Negara Indonesia.

Dalam *Global Competitiveness Report 2015-2016*, yang disusun oleh lembaga *World Economic Forum (WEF)*, Indonesia menempati urutan ke 62 dari 140 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Dengan peringkat yang bertahan di standar rata-rata, namun tetap menyebabkan beberapa masalah besar dalam perekonomian Indonesia.

Infrastruktur yang kurang memadai juga mempengaruhi daya tarik investor asing. Investor asing memiliki rasa kekhawatiran untuk berinvestasi di Indonesia, seperti; fasilitas manufaktur di Indonesia kalau pasokan listrik tidak pasti, dan biaya transportasi sangat tinggi. Kenyataannya, Indonesia sering mengalami

gangguan pemadaman listrik, meskipun Indonesia dinyatakan berlimpah sumber daya energi. Kasus pemadaman listrik cukup sering terjadi di Provinsi Indonesia terutama di Pulau Sumatera. Namun, pemadaman listrik di Pulau Jawa dan di Bali dapat dikatakan tidak seringnya mengalami pemadaman listrik dikarenakan Pulau Jawa dan Bali merupakan daerah yang paling besar penyumbang dana terbesar untuk Indonesia dalam berbagai sektor yang dimiliki kedua daerah tersebut.

Tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan merupakan barometer BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan penduduk tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat suatu kabupaten/kota diharapkan semakin sejahtera masyarakat penduduk yang berada di bagian wilayah tersebut.

#### ✓ **Kesehatan di Indonesia**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat dengan jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa yang terdiri atas 128.366.718 jiwa penduduk laki-laki dan 127.094.968 jiwa penduduk perempuan. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Informasi Kementerian Kesehatan. Jumlah penduduk yang banyak ini tidak dipungkiri akan menimbulkan masalah-masalah yang kompleks, salah satunya adalah masalah mengenai pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang sedemikian banyaknya. Pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk penduduknya sendiri karena hal itu nantinya akan menjadi “bonus” tersendiri untuk suatu negara menjadi negara dengan penduduk yang sehat.

*Kesehatan* merupakan investasi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kependudukan lainnya seperti kemiskinan karena suatu negara tanpa penduduk yang sehat tidak akan mungkin dapat membangun negaranya sendiri. Pelayanan kesehatan merupakan faktor penting untuk meningkatkan “taraf hidup” dari penduduk itu sendiri. Namun nyatanya hingga saat ini pelayanan kesehatan di Indonesia belum bisa dikatakan cukup memadai untuk seluruh penduduk Indonesia terutama untuk penduduk yang tinggal di daerah timur Indonesia seperti Maluku, NTT, NTB dan Papua dengan tingkat gizi buruk diatas 40%. Mengang hal tersebut tidak bisa langsung kita buat menjadi acuan dalam penentuan status pelayanan kesehatan di Indonesia namun hal itu dapat menjadi tamparan keras bagi bangsa kita karena betapa tidak meratanya pelayanan kesehatan di Indonesia.

#### ✓ **Pendidikan di Indonesia**

Dalam dunia pendidikan Indonesia masih memiliki kendala yang berkaitan dengan dunia pendidiakn, sehingga nilai pendidikan di Indonesia merupakan salah satu penyumbang kemiskinan di Indonesia.

Di Indonesia dunia pendidikan masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di Indonesia, terlebih lagi di daerah berujung kepada meningkatnya arus urabanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan.

Menurut pegiat pendidikan Indoensia Anies Baswedan dalam keterbatasan akses pendidikan di daerah menjadi pangkal deras arusnya urbanisasi. Secara tidak langsung, masyarakat Indonesia didorong untuk melakukan urbanisasi karena keterbatasan fasilitas di daerah. Ia menilai akses pendidikan harus dibuka seluas-luasnya untuk seluruh masyarakat dengan penyediaan fasilitas yang mendukung program tersebut. Selain itu, jumlah guru yang sesuai dengan kualifikasi saat ini masih belum merata di daerah. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad saat ini banyak sekolah dasar (SD) di Indonesia kekurangan tenaga guru dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 112 ribu guru. Untuk mengatasinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam hal distribusi guru di daerah-daerah supaya lebih merata.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini antara lain :

1. Terjadinya ketidakmerataan tingkat kemiskinan antara Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, Indonesia bagian Timur.
2. Kurang meratanya fasilitas-fasilitas publik seperti infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan di Indonesia.
3. Terjadinya ketimpangan pendapatan penduduk, dan keparahan atau kedalam tingkat kemiskinan di Indonesia.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini batasan masalah untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Mengingat ketersediaan waktu, biaya maupun kemampuan yang dimiliki, penelitian ini hanya Memfokuskan pada Karakteristik Kemiskinan di Indonesia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti dari penelitian ini, adapun masalahnya yaitu :

1. Bagaimana perkembangan penduduk miskin di Indonesia tahun 2013 – 2017.
2. Bagaimana karakteristik kemiskinan di Indonesia.
3. Bagaimana hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi se Indonesia?
4. Bagaimana tingkat kedalaman keparahan kemiskinan di Indonesia?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Melakukan Analisis perkembangan penduduk miskin di Indonesia tahun 2013 - 2017
2. Melakukan analisis karakteristik kemiskinan di Indonesia.
3. Melakukan analisis tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia
4. Menganalisis pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi se Indonesia dan meng gambarkannya dengan Tipologi Klassen

### **1.5 Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

## 1. Akademik

- Bagi penulis, hasil penelitian ini memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan Karakteristik kemiskinan di Indonesia.
- Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Karakteristik Kemiskinan di Indonesia
- Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan kajian yang lebih luas lagi guna menyempurnakan penelitian khususnya Karakteristik Kemiskinan di Indonesia.

## 2. Non Akademik

- Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dijadikan masukan yang bermanfaat dalam mengambil kebijakan, terutama yang berkaitan dengan Kemiskinan.
- Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini akan dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat agar diharapkan dapat menjadi salah satu untuk memantau dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan penurunan dalam sektor kemiskinan di Indonesia dan Provinsi yang ada di Indonesia serta memberikan data yang dibutuhkan oleh para penentu kebijakan sebagai suatu bukti untuk dapat dilakukannya pengambilan keputusan berdasarkan fakta.
- Bagi stakeholder, hasil penelitian ini akan dijadikan acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dan juga untuk mengetahui

seberapa besarnya anggaran pemerintah yang dikeluarkan dalam pembiayaan sektor kemiskinan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **2.1 Teori Pembangunan Ekonomi**

Berdasarkan atas definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses dimana saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan ekonomi tersebut sehingga dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan seksa,a. Dengan cara tersebut bisa diketahui beberapa peristiwa uang timbul yang akan mewujudkan peningkatana kegiatan ekonomu dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.

##### **2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi (Schumpeter)**

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (discontinuous) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yangh ada sebelumnya (Jhingan 2000:125)

##### **2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi (Sadono Sukirno)**

Menurut Sadono Sukirno mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yan menyebabkan pendapatan per-kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomu merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui srangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sadono Sukirno 1985:13).

#### **2.1.4 Teori Pembangunan Ekonomi (Sumitro Djojohadikusumo)**

Menurut Sumitro Djojohadikusumo pembangunan ekonomi adalah suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural yaitu perubahan pada landasan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan (Sumitro Djojohadikusumo:1994)

#### **2.1.5 Teori Pembangunan Ekonomi (Todaro)**

Menurut Todaro pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan.

Todaro dalam (Arsyad 1999:5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi:

- 1) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (basic needs).
- 2) Meningkatnya rasa harga diri (self esteem) masyarakat sebagai manusia.
- 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural. Perubahan tersebut terjadi pada landasan kegiatan ekonomi maupun kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Pembangunan secara luas dapat didefinisikan sebagai proses perbaikan dari suatu masyarakat yang berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sedangkan secara umum pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Transformasi dari struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat dari peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di berbagai sektor. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan (Todaro dan Smith, 2006:28).

Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Terdapat beberapa indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, antara lain :

### **2.1.1 Produk Domestik Bruto**

Indikator yang pertama yaitu produk domestik bruto atau dikenal dengan istilah Gross Domestic Product (GDP). Produk domestik bruto adalah ukuran kapasitas produksi barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Peningkatan produk domestik bruto memang bukan merupakan implikasi langsung dari keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah.

Namun, ia dijadikan gambaran tentang perputaran kegiatan ekonomi di daerah yang semakin meningkat.

Salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisi, PDRB adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun.

Menurut BPS ada tiga cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.

a. Pendekatan Produksi

PDRB menurut pendekatan produksi adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi sembilan sektor lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, gas, dan air bersih
5. Bangunan dan Konstruksi
6. Perdagangan, hotel dan restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi

8. Jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan
9. Jasa-jasa Lainnya.

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir dari;

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba)
2. Konsumsi pemerintah
3. Pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
4. Pembentukan stok
5. Ekspor netto (ekspor dikurang impor)

c. Pendekatan pengeluaran

Pendekatan ini menjumlahkan nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Jika dilihat dari segi penggunaan maka total penyediaan/produksi barang dan jasa itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan tetap bruto (investasi), perubahan stok, dan ekspor netto.

### **2.1.2 Pendapatan per-Kapita**

Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolak ukur kemakmuran dari suatu negara. Negara yang memiliki nilai pendapatan nasional yang tinggi belum tentu lebih makmur bila dibandingkan dengan negara yang berpendapatan rendah dikarenakan jumlah penduduk pun menentukan tingkat kemakmuran dari negara

tersebut. Meski suatu negara memiliki pendapatan nasional yang tinggi namun jumlah penduduknya sangat banyak maka belum tentu negara tersebut tergolong sebagai kelompok negara makmur. Begitu pun sebaliknya, apabila pendapatan nasional suatu negara kecil tetapi jumlah penduduknya sedikit maka belum tentu negara tersebut tergolong miskin, malah bisa jadi negara tersebut tergolong sebagai negara yang makmur.

Pendapatan perkapita tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Untuk melihat tingkat kemakmuran suatu negara antara lain sebagai berikut :

- Pembagian (Distribusi) pendapatan nasional.

Apabila pendapatan nasional hanya menumpuk pada sebagian orang saja, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan makmur walaupun pendapatannya tinggi dan pendapatan perkapitanya tinggi.

- Persentase Penduduk

Dalam negara tersebut yang masih hidup dibawah garis kemiskinan

- Kemudahan untuk memperoleh bahan-bahan kebutuhan hidup, dan
- Kemudahan untuk memperoleh lapangan pekerjaan.

Pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{GDP per kapita} = \frac{\text{GDP tahun } x}{\text{jumlah Penduduk tahun } x}$$

$$\text{GDP per kapita} = \frac{\text{GNP tahun } x}{\text{jumlah Penduduk tahun } x}$$

Kegunaan dari perhitungan pendapatan perkapita sebagai berikut :

- a) Sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun

- b) Sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain.  
Dengan demikian dapat dilihat tingkat kesejahteraan pada tiap-tiap negara.
- c) Sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun
- d) Sebagai data pengambilan kebijakan bidang ekonomi. Adanya hasil pendapat perkapita akan menjadi pertimbangan perkapita akan menjadi pertimbangan bagi para pengambilan kebijakan di bidang ekonomi.

### **2.1.3 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks pembangunan manusia adalah ukuran perbandingan dari angka harapan hidup, angka melek huruf, kualitas pendidikan, dan standar hidup dari masyarakat suatu negara atau wilayah. Selain digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, IPM juga dapat digunakan untuk mengklarifikasikan sebuah negara apakah termasuk negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, Human Development Report, 1993)

#### **a) Indeks Harapan Hidup**

Indeks harapan hidup atau disebut juga lamanya hidup diartikan bahwa bertahan lebih lama dapat diukur dengan indeks harapan hidup saat lahir (life expectancy of birth) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (infant mortality rate). Dengan menyertakan informasi tentang angka kelahiran dan kematian per tahunnya, dimana variabel tersebut

diharapkan mampu mempersentasikan rata-rata lama hidup beserta hidup sehat masyarakat. Dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan informasi orang yang meninggal pada periode waktu tertentu, maka digunakan metode tidak langsung. Perhitungan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan dua data dasae yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dari wanita yang pernah kawin. Untuk mendapatkan indeks harapan hidup dengan menetapkan indeks harapan hidup dengan menetapkan standart angka harapan hidup berdasarkan nilai maksimum dan minimumnya.

b) Indeks Pendidikan

Untuk meghitung Indeks Pendidikan (IP) dalam perhitungan IPM, mencakup dua parameter yaitu angka melek huruf (Lif) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Perlunya batasan tersebut agar angkanya dapat mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berumur dibawah 15 tahun masih dalam proses sekoloah akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua parameter tersebut disertakan agar mampu menggambarkan tingkat pengetahuan (gambaran angka LIT), dimana LIT merupqkan rasio penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan gambaran angka MYS merupakan cerminan terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Pembangunan manusia terdapat tiga nilai inti pembangunan universal yang dijadikan tujuan utamanya yaitu: (Todaro M.P., 1999)

- Kecukupan, adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada umumnya seperti sandang, pangan dan papan, kesehatan dan keamanan. Apabila salah satu kebutuhan tersebut belum terpenuhi maka akan menyebabkan keterbelakangan absolut.
- Jati diri, yaitu apabila masyarakat mampu menjadi manusia seutuhnya. Maksudnya adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, mampu mengahragai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan seterusnya.
- Kebebasan dari sikap mengahamba, merupakan kemampuan untuk memilih sebagai mana yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan disini diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri tegak dan mandiri sehingga tidak dapat diperbudak oleh pengejaran persepektif-persepektif material dalam kehidupan. Kebebasan disini juga diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran-ajaran yang diagmatis.

Indeks ini dibuat tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada:

1. Angka rata-rata hidup pada umur satu tahun
2. Angka kematian bayi, dan
3. Angka melek huruf

Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan

keluarga dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya.

#### **2.1.4 Urbanisasi**

Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi juga dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk yang asalnya dari pedesaan menuju ke perkotaan, biasanya perpindahan penduduk ini bertujuan untuk mencari pekerjaan dan menetap. Sedikitnya lapangan pekerjaan serta fasilitas penunjang di pedesaan serta tidak meratanya pembangunan diberbqqgai daerah menjadi salah satu dari sekian banyak faktor pemicu terjadinya hal tersebut.

Faktor lain yang turut mempengaruhi terjadinya kegiatan urbanisasi adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak.

##### **Faktor terjadinya Urbanisasi**

- Kehidupan kota yang lebih layak
- Sarana dan prasarana di perkotaan lebih lengkap dan memadai
- Tersedianya banyak lapangan pekerjaan
- Tingkat pendidikan di perkotaan lebih baik dan berkualitas.

Dari faktor-faktor terjadinya urbanisasi akan menimbulkan dampak negatif dan dampak positif terjadinya urbanisasi, dampak terjadinya urbanisasi antara lain :

##### **Dampak positif Urbanisasi bagi desa:**

- Mengurangi jumlah penduduk di desa
- Menigkatnya kesejahteraan penduduk desa karena hasil upah di kota lebih tinggi

- Mendorong pembangunan desa
- Mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan.

**Dampak negatif Urbanisasi bagi desa:**

- Kekurangan tenaga kerja (dalam sektor pertanian)
- Hilangnya penduduk desa yang memiliki potensi dan berkualitas

**Dampak positif Urbanisasi bagi kota**

Urbanisasi membawa dampak positif bagi daerah yang didatangi. Antara lain:

- Kota dapat memnuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja
- Semakin banyaknya sumber daya manusia yang berpotensi dan berkualitas.

**Dampak Negatif Urbanisasi bagi kota**

Dampak negatif yang diberikan oleh kegiatan urbanisasi adalah:

- Meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan
- Munculnya tunawisma, tunasosial dan bangunan liar di kota.
- Meningkatnya kemacetan lalu lintas
- Meningkatnya kejahatan.

**2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan ekonomi sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik, beberapa perkembangan ekonomi fisik yang terjadi di suatu negara adalah penambahan produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur. Semua ini tersebut

biasanya diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara dalam periode tertentu.

Merupakan proses kenaikan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto) maupun pendapatan daerah (Produk Domestik Regional Bruto) dalam jangka panjang. Dengan tiga pada aspek penekannya, yaitu:

1. Proses, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran dari suatu perekonomian yang melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. Output per kapita, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output per kapita hal ini ada dua unsur yang penting seperti output total dan jumlah penduduk
3. Jangka waktu, yaitu kenaikan output per kapita selama 1 – 2 tahun lalu diikuti penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang lama (5 tahun atau lebih) mengalami kenaikan output per kapita.

### **2.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik (Adam Smith)**

Adam Smith mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam buku yang berjudul *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations* tahun 1776 ia menemukan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang yang sistematis. Inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibagi menjadi dua aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk.

#### a. Pertumbuhan Output

Sistem produksi suatu negara dari tiga unsur pokok, yaitu:

1. Sumber daya alam (faktor produksi tanah)
2. Sumber daya manusia (jumlah penduduk)
3. Stok kapital yang tersedia.

Sumberdaya alam merupakan faktor pembatas (batas atas) dari pertumbuhan ekonomi. Selama sumberdaya alam belum sepenuhnya dimanfaatkan maka yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah sumberdaya manusia (tenaga kerja) dan stok kapital. Namun, jika sumberdaya alam telah dimanfaatkan sepenuhnya (dieksploitir) atau dengan kata lain batas atas daya dukung sumberdaya alam telah dicapai maka pertumbuhan ekonomi akan berhenti. Sumber daya manusia atau jumlah penduduk dianggap mempunyai peranan yang pasif di dalam pertumbuhan output. Artinya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja di suatu masyarakat, berapapun tenaga kerja yang dibutuhkan akan dapat terpenuhi. Dengan demikian, faktor tenaga kerja bukan kendala di dalam proses produksi nasional. Faktor kapital merupakan faktor yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu akumulasi kapital sangat berperan dalam proses pertumbuhan ekonomi.

#### b. Pertumbuhan Penduduk

Menegenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapatbahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi

karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2010).

### **2.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik (Yoseph Schumpeter)**

Menurutnya pembangunan ekonomi disebabkan oleh karena adanya perubahan-perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Sebagai kunci dari teori Schumpeter adalah bahwa untuk perkembangan ekonomu, faktor yang terpenting adalah entrepreneur, yaitu orang yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional.

Yoseph Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi diciptakan oleh inisiatif golongan pengusaha inovatif, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasikan barang-barang yang diperlukan masyarakat secara keseluruhan. Merekalah yang menciptakan inovasi para pengusaha itu dalam bentuk (Suryana, 2000):

1. Memperkenalkan barang baru
2. Menggunakan cara-cara baru dalam memproduksi barang
3. Memperluas pasar barang ke daerah-daerah baru
4. Mengembangkan sumber bahan mentah yang baru
5. Megadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industri.

Menurut teori Schumpeter, semakin tinggi tingkat kemajuan perekonomian, maka semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat dan pada akhirnya akan terjadi keadaan yang tidak berkembang (stationary state). Namun, berbeda dengan keadaan Klassik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Faktor-faktor

yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah dan kualitas penduduk, sumber daya modal dan teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, sumber daya alam, luas pasar.

Adanya perkembangan teknologi, menurut pandangan Neo-Klassik merupakan salah satu faktor pendorong kenaikan pendapatan nasional, yang dimaksud dengan perkembangan dalam teori ini adalah penemuan-penemuan baru yang relatif lebih bersifat penghematan buruh sehingga dengan adanya kemajuan teknis akan menciptakan permintaan yang kuat akan barang-barang modal. Proses perkembangan ekonomi menurut teori ini adalah sebagai hasil dari hubungan harmonis antara faktor eksternal ekonomi. Faktor internal ekonomi timbul karena adanya kenaikan skala produksi sebagai akibat adanya efisiensi (hasil dari adanya mesin-mesin baru, spesialisasi, pasar yang lebih luas, dan manajemen yang lebih baik), sedangkan eksternal ekonomi timbul sebagai akibat adanya perkembangan industri yang saling ketergantungan dan komplementer dari berbagai sektor produksi dalam perekonomian.

### **2.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Harrod-Domar**

Menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh (steady growth) dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan oleh Harrod-Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa hal-hal berikut:

- Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment.

- Perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga (konsumen) dan sektor perusahaan (produsen).
- Fungsi tabungan dimulai dari titik nol, sehingga besarnya tabungan proposional dengan pendapatan.
- Hasrat menabung batas (Marginal propensity to save) besarnya tetap.

Sehingga menurut Harrod-Domar pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai kapasitas penuh (full capacity) dalam jangka panjang.

Harrod-Domar adalah ahli ekonomi yang mengembangkan analisis Keynes yang menekankan tentang perlunya penanaman modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1999:58). Oleh karena itu menurutnya setiap usaha ekonomi harus menyelamatkan proporsi tertentu dari pendapatan nasional yaitu untuk menambah stok modal yang akan digunakan dalam investasi baru. Menurut Harrod-Domar, ada hubungan ekonomi yang langsung antar besarnya stok modal dan jumlah produksi nasional.

#### **2.2.4 Teori Pertumbuhan menurut Rostow**

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi adalah suatu transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, melalui tahapan:

1. Masyarakat tradisional, yaitu suatu masyarakat yang strukturnya berkembang di dalam fungsi produksi yang terbatas yang didasarkan pada teknologi dan ilmu pengetahuan dan sikap yang masih primitif, dan berfikir irasional.

2. Prasyarat lepas landas, yaitu suatu masa transisi di mana suatu masyarakat mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang (*selfsustained growth*).
3. Lepas landas, adalah suatu masa di mana berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbentuknya pasar baru.
4. Tahap kematangan, adalah suatu masa di mana suatu masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor-faktor produksi dan kekayaan alam.
5. Masyarakat berkonsumsi tinggi, yaitu suatu masyarakat di mana perhatiannya lebih menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi.

### **2.2.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi menurut Kuznets**

Menurut Kuznets (Todaro, 2011) pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada masyarakat. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan dengan adanya kemajuan teknologi, memperhitungkan adanya pertambahan penduduk, secara institusi dan dasar terhadap berbagai tuntutan kondisi yang ada dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Ciri-ciri proses

pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet pada negara yang sedang maju sebagai berikut:

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan penambahan penduduk yang tinggi.
2. Tingkatkenaikan total produktivitas faktor yang tinggi, khususnya produktivitas tenaga kerja.
3. Tingkat transformasi struktur perekonomian ekonomi yang tinggi.
4. Tingkta transformasi sosila dan ideologi uang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau yang sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambha bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

#### **2.2.6 Teori Pertumbuhan Ekonomi (Solow dan Swan)**

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Solow dan Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi (eksogen), dan besarnya output yang saling berinteraksi. Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu : akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan skill atau kemajuan

teknik sehingga produktivitas meningkat. Dalam model Solow-Swan masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu.

### **2.2.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi David Ricardo**

Garis besar pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith yaitu bahwa proses pertumbuhan masih pada perpaduan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah fakto produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.

Salah satu ciri perekonomian ricardo yaitu bahwa akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada diatas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk melakukan investasi.

Menurut David Ricardo, peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja yaitu bisaa memperlambat bekerjanya *the law of dinnishing of returns* yang akhirnya akan memperlambat penurunan tingkat kearah tingkat hidup minimal. Inilah inti dari proses pertumbuhan ekonomi (kapitalis) menurut Ricardo. Proses ini adalah proses tarik-menarik dua kekuatan dinamis yaitu *the law of dinnishing* dan kemajuan teknologi yang akhirnya dimenangkan oleh *the lawa of dinnishing returns*. (Arsyad, 1992:52-53).

### 2.3 Teori Kemiskinan

Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta benda (Poerwadarminta, 1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi itu rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kemiskinan menurut (*World Bank*) merupakan keadaan dimana seorang individu atau kelompok tidak memiliki pilihan atau peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya guna menjalankan kehidupan yang sehat dan lebih baik sesuai standar hidup, memiliki harga diri dan dihargai oleh sesamanya.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan

komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

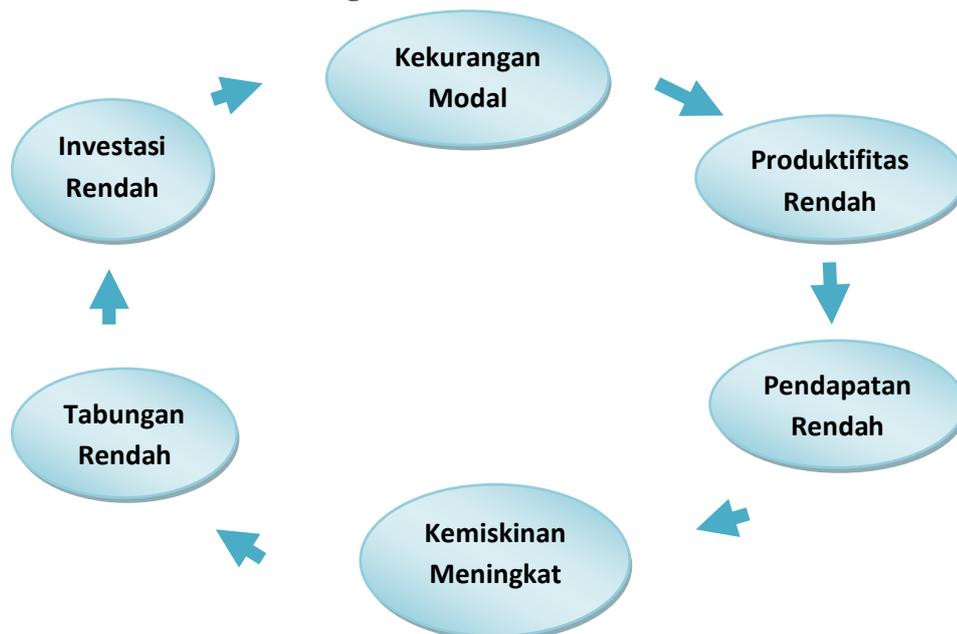
Kemiskinan menurut drewnowski (Epi Supiadi, 2003) mencoba menggunakan indikator-indikator sosial untuk mengukur tingkat-tingkat kehidupan (the level of living index). Menurutny terdapat tiga tingkatan kebutuhan untuk menentukan kehidupan seseorang :

- Kehidupan fisik dasar (basic fisical needs), yang meliputi gizi/nutrisi, perlindungan/perumahan (shelter/housing) dan kesehatan.
- Kebutuhan budaya dasar (basic cultural needs), yang meliputi pendidikan, penggunaan waktu luang dan rekreasi dan jaminan sosial (social security).
- High income, yang meliputi pendapatan yang surplus atau melebihi takarnya (Ichwanmuis,2011)

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang. Dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional, kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional yaitu meilihat dari banyaknya kebutuhan manusia bermacam-macam, maka kemiskinan pada memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset,

organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Sebagai dampak dari sifat kemiskinan tersebut tergambar dalam bentuk kekurangan gizi, air, dan perumahan yang tidak sesuai pelayanan kesehatan yang kurang baik serta rendahnya tingkat pendidikan.

**Gambar 2.1.1**  
**Lingkar Kemiskinan**



*Sumber: Ragnar Nurkse (1953) dalam Mudrajat Kuncoro (2000)*

Lingkar kemiskinan merupakan gambaran hubungan kausalitas yang tak terbatas, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut: pendapatan masyarakat domestik yang rendah dikarenakan produktifitas yang rendah mengakibatkan semakin meningkat menyebabkan tingkat tabungan domestik menjadi rendah, rendahnya tingkat tabungan domestik akan menyebabkan tingkat investasi domestik menjadi rendah, modal domestik yang mengalir menjadi rendah dalam suatu daerah mengakibatkan dalam suatu daerah mengakibatkan dalam suatu

daerah kekurangan modal. Hal ini mengakibatkan penurunan pada tingkat produktifitas domestik menjadu rendah, produktifitas domestik yang rendah mengakibatkan pendapatan domestik menjadi rendah, begitu pula seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan seperti gambar diatas.

Kesalahan pemerintah dalam penetapan kebijakan yang ada menjadi permasalahan yang ada saat ini, terlebih lagi pada negara yang luas dan masih berkembang seperti Indonesia, dimana masalah kemiskinan menjadi permasalahan utama yang ada saat ini di suatu negara terkhususnya untuk Indonesia. Sehingga dalam penetapan kebijakan haruslah melihat karakteristik lingkungan dan penduduk yang ada pada daerah tersebut, agar dalam penetapan kebijakan dan program – program pemerintahan dapa tepat sasaran. Kemiskinan dapat dibagi secara umum dan sederhana antara lain;

### **2.3.1 Kemiskinan Absolut**

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan absolut apabila memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ukuran ini digunakan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memnuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk melangsungkan hidup.

### **2.3.2 Kemiskinan Relatif**

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan relatif apabila kebutuhan dasarnya dalam ukuran kemiskinan relatif apabial kebutuhan dasarnya lebih terpenuhi, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasrkan ukuran ini, garis kemiskinan akan

mengalami perubahan apabila tingkat hidup masyarakat berubah, sehingga pengukuran kemiskinan relatif bersifat dinamis atau akan selalu ada.

### **2.3.3 Kemiskinan Kultural**

Individu atau kelompok yang termasuk dalam ukuran kemiskinan kultural apabila individu atau kelompok tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain maupun ada peluang, dengan kata lain individu atau kelompok tersebut miskin karena sikapnya sendiri, yaitu pemalas dan tidak ada usaha untuk memperbaiki kehidupannya ke kondisi yang lebih baik.

Pengaruh kemiskinan dengan berbagai aspek ekonomi terdiri dari 3 komponen utama sebagai penyebab kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran, kesehatan dan bukan hanya itu saja seperti upah minimum kabupaten/kota juga menjadi faktor kemiskinan. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat pengangguran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sadono Sukirno, 2003).

### **2.3.4 Sebab-sebab terjadinya Kemiskinan**

Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antar 6 karakteristik, yaitu:

- Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.

- Pendapatan perkapita negara-negara Dunia ketiga juga masih rendah dan pertumbuhannya amat sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- Distribusi pendapatan amat sangat timpang atau sangat tidak merata.
- Mayoritas penduduk di negara-negara Dunia ketiga harus hidup dibawah tekanan kemiskinan absolut.
- Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di Dunia Ketiga sepuluh kali lebih tinggi dibanding dengan yang ada di negara maju.
- Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan disuatu daerah adalah insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan dapat diartikan sebagai persentase penduduk yang memiliki pendapatan (proksi pendapatan) kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memnuhi kebutuhan dasar hidup. Walaupun demikian, kemiskinan memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan. Dimensi lain kemiskinan dapat dilihat dari peluang memperoleh kesehatan dan umur panjang, peluang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan lain – lain. Intinya adalah kemiskinan sangat terkait dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihannya dalam hidup.

Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, maka pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia (enlarging choice) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah (IPM, 2007).

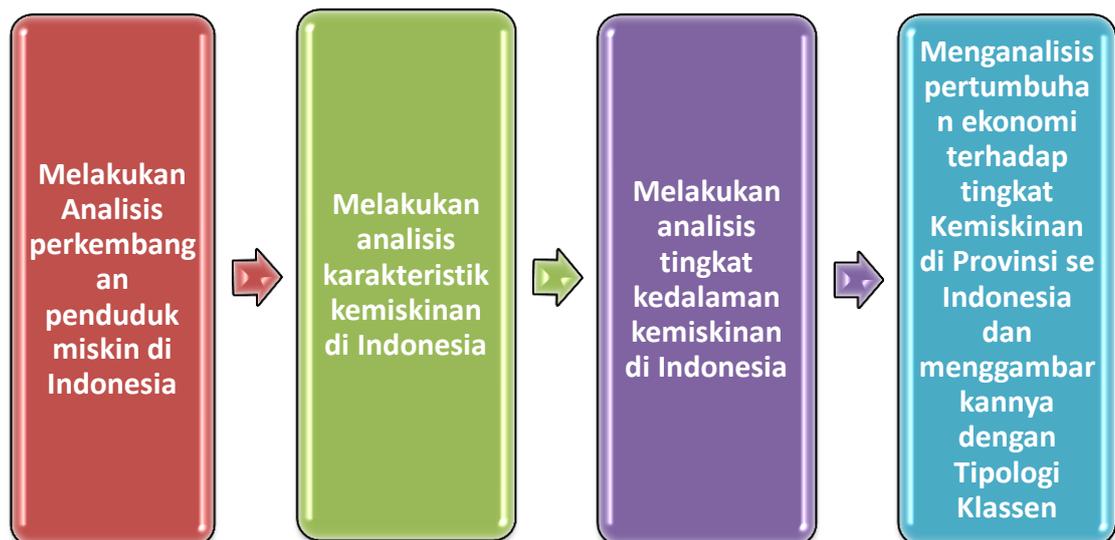
#### 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Penelitian &amp; Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Riset</b>
Samsubar Saleh (2002), Faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan regional di Indonesia	YPC; tingkat pendapatan perkapita perprovinsi  IMP; pengeluaran pemerintah untuk investasi sumberdaya manusia perkapita perprovinsi  IFP; pengeluaran pemerintah untuk investasi fisik per kapita per provinsi  HH; angka harapan hidup  MH; angka melek huruf persentase dari total penduduk  RS; rata-rata lama sekolah  HDI; indeks pembangunan manusia  RG; rasio gini	YPC berpengaruh negatif. RG mempunyai pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. HDI mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan. IMP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. IFP signifikan namun dengan arah yang tidak diharapkan positif.
Hermanto Siregar dan wi Wahyuni (2007), Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah		Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin walaupun dengan berpengaruh yag relative

penduduk miskin		<p>kecil.</p> <p>Inflasi dan populasi penduduk berpengaruh positif dan signifikan.</p> <p>Sektor pertanian dan sektor industri secara signifikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.</p> <p>Dan pendidikan yang paling besar dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.</p>
Carolina Margaretha dan Sartika Djamaluddin, Analisis karakteristik Rumah Tangga Miskin antar Wilayah di Indonesia	Ukuran Rumah Tangga, Jumlah Balita, Rasio ART berkerja, Luas Lantai Perkapita, Jenis Lantai Terluas, Jenis Bahan Bakar Utama, Jenis Penerangan Utama, Jenis Sumber air Utama.	Didapati bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan pada variabel dependen di semua wilayah di Indonesia

## 2.5 Kerangka Konseptual



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menganalisis hubungan antar variabel. Data yang disajikan adalah *panel* data yaitu dimana penelitian menggunakan data *cross section* data yang diteliti dari satu dan *time series* waktu yang dihimpun pada tahun yang berbeda secara bersamaan. Data yang akan diteliti adalah di Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Model analisis yang digunakan untuk melihat Karakteristik dari sisi Jumlah penduduk miskin menurut Provinsi, Perdesaan dan Perkotaan di Indonesia, tingkat ketimpangan kemiskinan di Indonesia dan dari sisi Indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia. Metode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Tipologi Klassen (Klassen Typology).

#### 3.2 Definisi Operasional

Definisi Operasional merupakan variabel yang digunakan untuk memuat suatu sifat-sifat dari variabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian.

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional**

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Proses perubahan kondisiperekonomian suatu negara secara berkisanambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Ketimpangan Pendapatan (KP)	Kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata.	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Tingkat Kemiskinan (TK)	Keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, dan kesehatan.	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Jumlah Penduduk Miskin(JP)	Kondisi rata-rata jumlah penduuduk miskin yang berada dalam garis kemiskinan dan dapat dikatakan masuk dalam golongan orang-orang yang tidak mampu memenuhi kehidupan sehari-hari.	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
Kedalaman Kemiskinan (KK)	Kondisi rata-rata indeks kedalaman kemiskinan penduduk miskin di Indonesia.	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>

### **3.3 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Medan Sumatera Utara dengan melihat data Tingkat Kemiskinan di Indonesia yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) pada periode 2013-2017.

### **3.4 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian direncanakan selama 3 bulan yaitu Desember 2017 sampai dengan Maret 2018.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari publikasi resmi yang berasal dari, *Badan Pusat Statistik, website* yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan menggunakan bahan – bahan kepustakaan berupa tulisan – tulisan ilmiah seperti artikel atau jurnal – jurnal ilmiah baik secara *online* maupun tidak *online* serta laporan – laporan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data yang diambil dari situs resmi Badan Pusat Statistik, yang berupa data panel (*pooled data*) dengan kurun waktu 5 tahun (dari tahun 2013 sampai tahun 2017).

### **3.7 Tahapan Analisis**

#### **3.7.1 Analisis Deskriptif**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data analisis deskriptif.

Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis sederhana yang dapat

digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik dan dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil peneliti.

- **Analisis Perkembangan Penduduk Miskin di Indonesia**

Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari tahun 2013-2017.

- **Melakukan analisis karakteristik kemiskinan di Indonesia**

Salah satu karakteristik kemiskinan di Indonesia adalah perbedaan yang begitu besar antara nilai kemiskinan relatif dan nilai kemiskinan absolut dalam hubungan dengan lokasi geografis, usia, dan wilayah (perdesaan/perkotaan).

### **3.7.2 Analisis Tipologi Klassen**

Alat analisis kelas Typology (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu : daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (high growth and high income), daerah maju tapi tertekan (high income but low growth), daerah berkembang cepat (high growth but income), dan daerah relatif tertinggal (low growth and low income) (Kuncoro dan Aswandi, 2002: 27-45).

- **Menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi se-Indonesia dan menggambarkannya dengan Tipologi Klassen.**

Menurut Tambunan (2001) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari pertumbuhan pendapatan tersebut, yang

selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan.

Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin akan menurun digambarkan dengan menggunakan Tipologi Klassen.

- **Melakukan Analisis tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia**

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesudu dari garis kemiskinan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Letak Geografis Indonesia

Letak geografis Indonesia adalah posisi negara Indonesia yang dilihat dari permukaan bumi secara nyata penampakan alam yang membatasi Indonesia. Letak geografis menekan pada fenomena alam berupa keadaan alam yang menlingkupi wilayah tersebut. Hal ini berarti benua, samudera, danau, laut dan sebagainya. Batasan letak geografis Indonesia secara umum diapit oleh dua benua dan dua samudera.

##### 1) Letak Astronomi Indonesia

Selain letak geografis di Indonesia ada letak astronomis dimana posisi Indonesia yang dipengaruhi oleh garis khayal bumi yakni garis lintang dan bujur yang mengelilingi bumi. Di namai garis khayal karena memang pada permukaan bumi sebenarnya, garis ini tidak ada hanya merupakan pengembangan ilmu astronomi. Letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang dan bujur, yaitu antara lain:

##### 1. Garis Lintang

Garis lintang membagi struktur bumi menjadi 2 bagian sama besar yaitu antara utara dan selatan. Garis lintang sejajar dengan garis khayal khatulistiwa (equator) yang membentang hingga kutub selatan dan kutub utara. Letak astronomis Indonesia berada pada titik 6° lintang utara (LU) sampai 11° Lintang Selatan (LS).

##### 2. Garis bujur

Garis bujur membelah bumi secara horizontal, dari barat ke timur. Garis bujur disebut juga dengan garis meredian yang membatasi letak astronomis Indonesia antara 95° Bujur Timur (BT) – 141° bujur timur (BT).

### 3. Pengaruh Letak Geografis dan Astronomis Indonesia

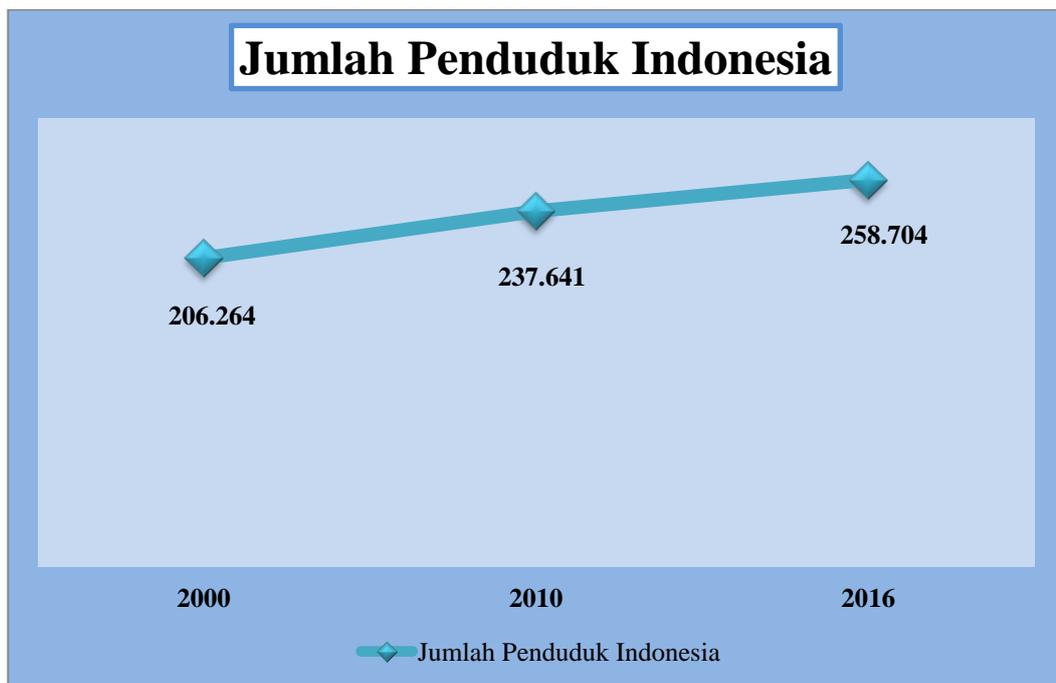
Beberapa hal yang mempengaruhi berdasarkan letak geografis :

- a. Mempengaruhi musim – Letak geografis Indonesia dilalui hembusan angin muson (monsoon). Angin muson membawa perbedaan musim yang mempengaruhi proses terjadinya hujan pada musim penghujan dan kemarau yang panas. Angin muson bergantian sepanjang tahun sebanyak 2 kali.
- b. Wilayah strategis – Letak Indonesia yang berada diantara 2 benua dan 2 samudera membuat Indonesia menjadi jalur perlintasan Internasional baik laut dan udara. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan ekonomi pada zona ekonomu eksklusif Indonesia yang dilewati industri-industri besar.
- c. Mempengaruhi iklim – Indonesia terletak di sepanjang garis khatulistiwa yang berarti memiliki iklim tropis. Wilayah negara dengan iklim tropis akan memperoleh sinar matahari sebagai pusat tata surya sepanjang waktu. Hal tersebut akan berbeda dengan yang terjadi pada iklim sub tropis yang memiliki 4 musim, begitu juga dengan daerah beriklim kutub.
- d. Mempengaruhi perbedaan waktu – Letak astronomis mempengaruhi perbedaan waktu yang ditetapkan mulai titik lintang dan bujur 0°

Greenwich Inggris. Indonesia sendiri terdiri terbagi menjadi 3 zona waktu yaitu WIB, WIT dan WITA sesuai keputusan Presiden No.41 Tahun 1987.

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak keempat di Dunia sebanyak 258,704% ribu jiwa. Untuk dapat melihat jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Gambar 4.1**  
**Jumlah Penduduk Indonesia**  
**Tahun 1996-2000-2016**



*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Dalam gambar diatas, jumlah penduduk Indonesia selama 17 tahun meningkat disetiap tahunnya. Untuk dapat melihat penduduk indonesia menurut provinsi, maka peneliti menyajikan tabel indonesia menurut Provinsi sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Jumlah penduduk Indonesia**  
**Tahun 1995-2000-2016**

Provinsi	Jumlah Penduduk		
	2000	2010	2016
Aceh	3.930.905	4.494.410	5.096.200
Sumut	11.649.655	12.982.204	14.102.900
Sumbar	4.248.931	4.846.909	5.259.500
Riau	4.957.627	5.538.367	6.501.000
Jambi	2.413.846	3.092.265	3.501.200
Sumsel	6.899.675	7.450.394	8.160.900
Bengkulu	1.567.432	1.715.518	1.904.800
Lampung	6.741.439	7.608.405	8.205.100
Bangka B	900.197	1.223.296	1.401.800
K. Riau	-	1.679.163	2.028.200
DKI Jakarta	8.389.443	9.607.787	10.277.600
<b>Jawa Barat</b>	<b>35.729.537</b>	<b>43.053.732</b>	<b>47.379.400</b>
<b>Jawa Tengah</b>	<b>31.228.940</b>	<b>32.382.657</b>	<b>34.019.100</b>
Yogyakarta	3.122.268	3.457.491	3.720.900
<b>Jawa Timur</b>	<b>34.783.640</b>	<b>37.476.757</b>	<b>39.075.300</b>
Banten	8.098.780	10.632.166	12.203.100
Bali	3.151.162	3.890.757	4.200.100
NTB	4.009.261	4.500.212	4.896.200
NTT	3.952.279	4.683.827	5.203.500
KalBar	4.034.198	4.395.983	4.861.700
KalTeng	1.857.000	2.212.089	2.550.200
KalSel	2.985.240	3.626.616	4.055.500
KalTim	2.455.120	3.553.143	3.501.200
SulUt	2.012.098	2.270.596	2.436.900
SulTeng	2.218.435	2.635.009	2.921.700
SulSel	8.059.627	8.034.776	8.160.900
SulTengg	1.821.284	2.232.586	2.551.000
Gorontalo	835.044	1.040.164	1.150.800
SulBar	-	1.158.651	1.306.500
Maluku	1.205.539	1.533.506	1.715.500
MalUt	785.059	1.038.087	1.185.900
PapBar	-	760.422	893.400
Papua	2.220.934	2.833.381	3.458.400

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

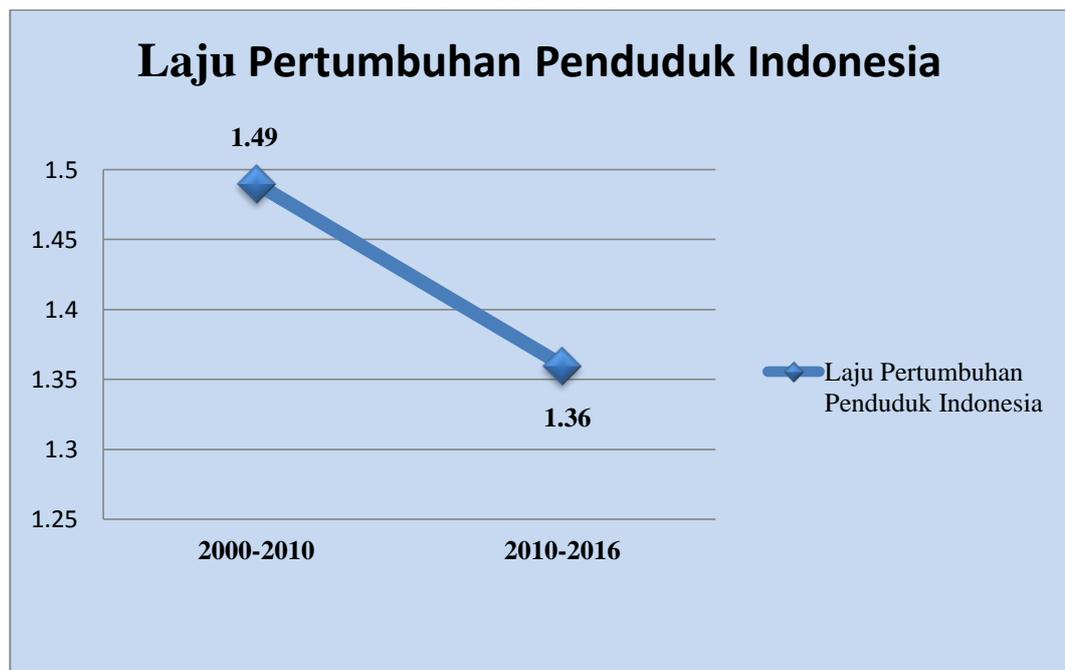
Dalam tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terpadat dan terbanyak di provinsi Jawa Barat. Penduduk di Provinsi Jawa Barat di tahun 2017 sebanyak 47.379.400 jiwa. Provinsi yang berada di urutan kedua sebagai provinsi

dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 39.075.300 jiwa. Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 34.019.100 jiwa ini berada di urutan ketiga sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Indonesia.

Selain jumlah penduduk Indonesia laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan penduduk, geometrik menggunakan asumsi bahwa laju pertumbuhan penduduk sama setiap tahunnya.

Untuk dapat melihat laju pertumbuhan penduduk di Indonesia maka peneliti mensajikannya dalam bentuk gambar sebagai berikut :

**Gambar 4.2**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun**  
**Tahun 1990-2016**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia mengalami peningkatan yang positif. Laju pertumbuhan

penduduk di tahun 2016 berjumlah sebanyak 1.36%. untuk dapat melihat laju pertumbuhan penduduk provinsi di Indoensia maka peneliti menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun**

Laju Pertumbuhan Penduduk per-Tahun		
Provinsi	2000-2010	2010-2016
Aceh	2,36	2,01
Sumut	1,10	1,33
SumBar	1,34	1,31
<b>Riau</b>	<b>3,58</b>	<b>2,59</b>
Jambi	2,56	1,80
Sumsel	1,85	1,46
Bengkulu	1,67	1,69
Lampung	1,24	1,21
Kep.Bangka.B	3,14	2,20
<b>Kep.Riau</b>	<b>4,95</b>	<b>3,06</b>
Jakarta	1,41	1,07
Jawa Barat	1,90	1,54
Jawa Tengah	0,37	0,79
Yogyakarta	1,04	1,18
Jawa Timur	0,76	0,66
Banten	2,78	2,23
Bali	2,15	1,21
NTB	1,17	1,36
NTT	2,07	1,69
KalBar	0,91	1,63
KalTeng	1,79	2,33
KalSel	1,99	1,81
KalTim	3,81	2,58
KalUt	-	-
SulUt	1,28	1,13
SulTeng	1,95	1,67
SulSel	1,17	1,10
SulTenggara	2,08	2,16
Gorontalo	2,26	1,62
SulBar	2,68	1,93
Maluku	2,80	1,79
Maluku Utara	2,47	2,16
Papua Barat	3,71	2,61
Papua	5,39	1,95

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)*

Jika dilihat dari tabel 4.2 diatas laju pertumbuhan meningkat berada di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Di Kepulauan Riau pada tahun 2010-2016 laju pertumbuhan penduduk berada di angka 3,06%. Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau menyatakan jumlah laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 4,99% pertahun, tertinggi dibanding wilayah lain di Sumatera.

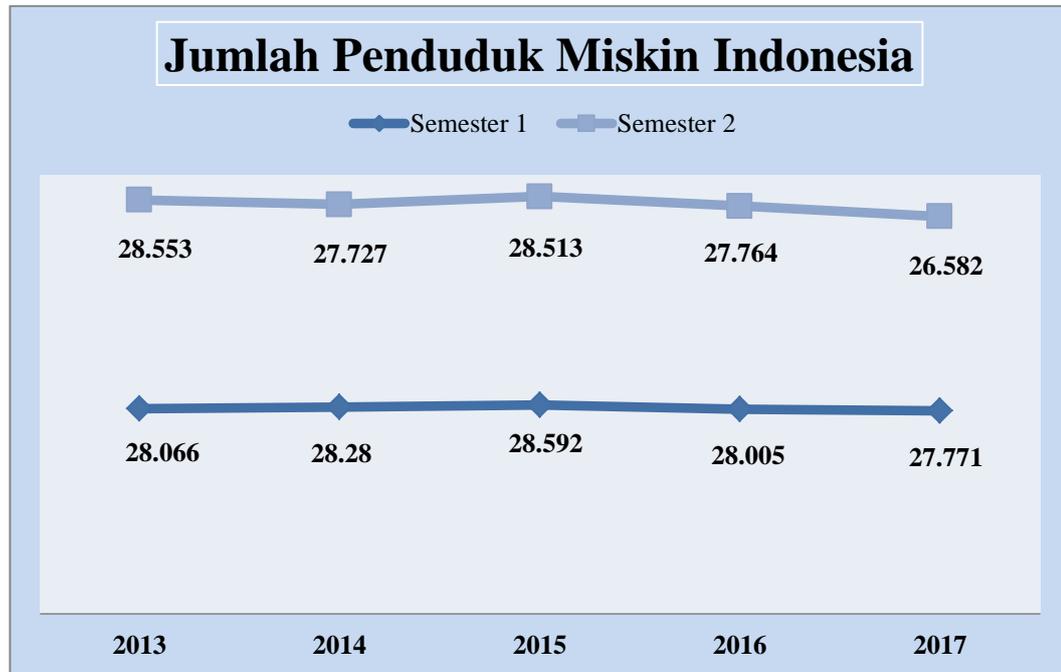
#### **4.2 Analisis perkembangan penduduk miskin di Indonesia tahun 2013 – 2017.**

Kemiskinan menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di bellahan dunia, khususnya di Indonesiabyang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa menyam pendidikan, kesulitan mmbiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan.

Chriswardani (2005) menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga meliputi tingkat kesehatan, tingkat pendidikan serta ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

Untuk dapat melihat tingkat kemiskinan di Indonesia selama 5 tahun, maka kita dapat melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia dan persentase penduduk miskin di indonesia dalam bentuk tabel 4.3 sebagai berikut :

**Gambar 4.3**  
**Jumlah Penduduk Miskin Indonesia**  
**Tahun 2013-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77% dan di September 2017 26%. Dengan jumlah penduduk tersebut merupakan angka yang terendah selama 5 tahun terakhir seperti yang disajikan di dalam tabel 4.3.

Untuk dapat melihat Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi tahun 2013-2017 maka peneliti menyajikan dalam bentuk tabel 4.3 dibawah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi**  
**Tahun 2013-2017**

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi tahun 2013-2017									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2
Aceh	840,71	855,71	881,26	837,42	851,59	859,41	848,44	841,31	872,61	829,80
Sumut	1.339	1.390	1.286	1.360	1.463	1.508	1.455	1.452	1.453	1.326
SumBar	407,47	380,63	379,20	354,74	379,61	349,53	371,56	376,51	364,51	359,99

Riau	469,28	522,53	499,88	498,28	531,39	562,92	515,40	501,59	514,62	496,39
Jambi	266,15	281,57	263,80	281,75	300,71	311,56	289,80	290,81	286,55	278,61
Sumsel	1.110	1.108	1.100	1.085	1.145	1.112	1.101	1.096	1.086	1.086
Bengkulu	327,35	320,41	320,95	316,50	334,07	322,83	328,61	325,60	316,98	302,62
Lampung	1.163	1.134	1.142	1.143	1.163	1.100	1.169	1.139	1.131	1.083
Kep.Bangka.B	69,22	70,90	71,64	67,23	74,09	66,62	72,76	71,07	74,09	76,20
Kep.Riau	126,66	125,02	127,80	124,17	122,40	114,83	120,41	119,14	125,37	128,43
Jakarta	354,19	375,70	393,98	412,79	398,92	368,67	384,30	385,84	389,69	393,13
Jawa Barat	4.297	4.382	4.327	4.238	4.435	4.485	4.224	4.168	4.168	3.774
Jawa Tengah	4.732	4.704	4.836	4.561	4.577	4.505	4.506	4.493	4.450	4.197
Yogyakarta	550,20	535,18	544,87	532,59	550,23	485,56	494,94	488,83	488,53	466,33
Jawa Timur	4.771	4.865	4.786	4.748	4.789	4.775	4.703	4.638	4.617	4.405
Banten	656,25	682,71	622,84	649,19	702,40	690,67	658,11	657,74	675,04	699,83
Bali	162,52	186,53	185,20	195,95	196,71	218,79	178,18	174,94	180,13	176,48
NTB	830,85	802,45	820,82	816,62	823,89	802,29	804,44	786,58	793,78	748,12
NTT	993,56	1.009	994,67	991,88	1.159	1.160	1.149	1.150	1.150	1.134
KalBar	369,01	394,17	401,51	381,92	383,70	405,51	381,35	390,32	387,43	388,81
KalTeng	136,95	145,36	146,32	148,82	147,70	148,13	143,49	137,46	139,16	137,88
KalSel	181,74	183,27	182,88	189,50	198,44	189,16	195,70	184,16	193,92	194,56
KalTim	237,96	255,91	253,60	252,68	212,89	209,99	212,92	211,24	220,17	218,67
KalUt	-	-	-	-	39,69	40,93	41,12	47,03	49,47	48,56
SulUt	184,40	200,16	208,23	197,56	208,54	217,15	202,82	200,35	198,88	194,85
SulTeng	405,42	400,09	392,65	387,06	421,62	406,34	420,52	413,15	417,87	432,27
SulSel	787,66	857,45	864,30	806,35	797,72	864,51	807,03	796,81	813,07	825,97
SulTenggara	301,71	326,71	342,25	314,09	321,88	345,02	326,86	327,29	331,71	313,16
Gorontalo	192,59	200,97	194,17	195,10	206,84	206,51	203,19	203,69	205,37	200,91
SulBar	154	154,20	153,89	154,10	106,48	153,21	152,73	146,90	149,76	149,47
Maluku	321,84	322,51	316,11	154,69	328,41	327,78	327,72	331,79	320,51	320,42
Maluku Utara	83,44	85,82	82,64	307,02	79,90	72,65	74,68	76,40	76,47	78,28
Papua	224,27	234,23	229,43	84,79	225,36	225,54	225,80	223,60	228,38	212,8

Barat										6
Papua	1.017	1.057	924,40	225,46	859,15	898,21	911,33	914,87	897,69	910,42

Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS)

Jika dilihat dari tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin menurut provinsi terbesar pertama terdapat di Provinsi Jawa Timur berjumlah sebanyak 4.405 juta jiwa dan provinsi kedua terdapat di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.197 juta jiwa, dan Provinsi ketiga terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 3.774.

Untuk dapat melihat perkembangan penduduk miskin di Indonesia maka kita dapat melihat jumlah penduduk miskin ditahun 2013-2017 yang disajikan dalam gambar sebagai berikut :

**Gambar 4.4**  
**Persentase Penduduk Miskin Indonesia**  
**Tahun 2015-2017**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Jumlah penduduk miskin dan Persentase penduduk miskin pada tabel diatas mengalami fluktuasi tiap tahunnya dari tahun 2015-2017. Persentase penduduk

miskin di tahun 2016 sebanyak 10,86% pada semester 1 yaitu pada Maret 2016 dan di semester 2 yaitu pada September 2016 persentase kemiskinan berkurang sebanyak 0,79%. Dan di Maret 2017 persentase kemiskinan sebanyak 10,64% dan di September 2017 persentase penduduk miskin sebanyak 10,12%. Berarti selama kurun waktu 1 tahun jumlah persentase penduduk miskin berkurang. Dapat disimpulkan bahwa disetiap tahunnya penduduk Indonesia mengalami peningkatan kesejahteraan hidup. Badan pusat statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2017 menurun dibandingkan September 2016 dari 10,70% menjadi 10,64%. Namun bila berdasarkan jumlah penduduk, BPS mencatat terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin dari 27,76 juta jiwa menjadi 27,77 juta jiwa. Ini merupakan pencapaian mengembirakan karena persentase penduduk miskin pada bulan September 2017 turun menjadi 10,12%. Ada berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret-September adalah inflasi umum yang relatif rendah yaitu 1,45%. Selain itu, rata-rata upah nominal buruh tani per-buruh tani pada september 2017 naik sebesar 1,5% dibandingkan Maret 2017, yaitu dari Rp.37.318 menjadi Rp. 37.711. dalam periode yang sama, upah nominal buruh bangunan perhari pada September naik sebesar 0,78% dibandingkan maret 2017 yaitu dari Rp. 83,724 menjadi Rp. 84.378.

Kemiskinan merupakan masalah yang tak pernah kunjung usai. Di negara-negara maju, kemiskinan lebih bersifat individual, yaitu disebabkan karena seseorang mengalami kecacatan (fisik atau mental), ketuaan, sakit yang parah, dan sebagainya. Namun pada negara berkembang, kemiskinan lebih disebabkan pada sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan. (Suharto:2009)

Penduduk miskin di Indonesia berada di dua daerah antara lain di daerah perkotaan dan perdesaan, untuk dapat melihat jumlah penduduk miskin menurut Provinsi dalam bentuk Perdesaan dan Perkotaan yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

#### 4.3 Analisis Karakteristik Kemiskinan di Indonesia

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan & Perdesaan**  
**Tahun 2013-2017**

Tahun	Perkotaan (Semester 1)	Perdesaan (Semester 1)	Perkotaan (Semester 2)	Perdesaan (Semester 2)
2013	10.325,55	17.741,05	10.634,47	17.919,46
2014	10.507,20	17.772,81	10.356,69	17.371,09
2015	10.652,64	17.940,15	10.619,86	17.893,71
2016	10.339,77	17.665,62	10.485,64	17.278,68
2017	10.673,83	17.097,39	10.272,55	16.310,44

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

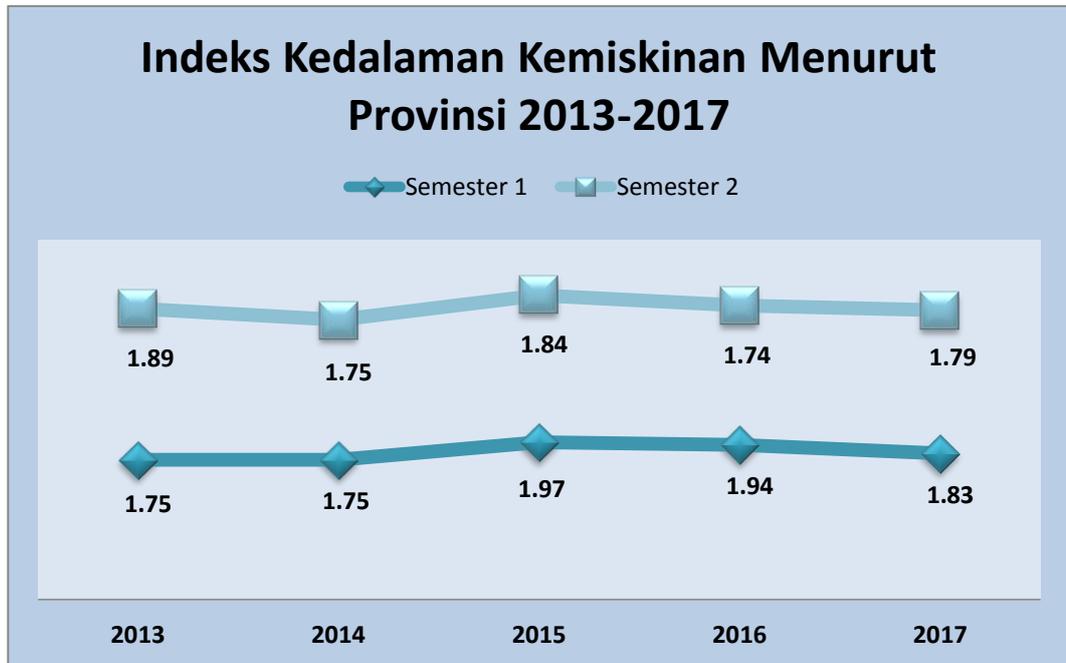
Jumlah penduduk miskin di Indonesia dilihat berdasarkan perkotaan / perdesaan terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari tahun 2013-2017 menunjukkan hasil positif karena jumlah penduduk miskin dalam Tahun 2017 akhir menunjukkan hasil yang positif atau berkurangnya jumlah penduduk miskin yang berada di perdesaan. Namun dapat dilihat dari tabel diatas, tingkat kemiskinan yang dapat dikatakan tinggi berada di daerah Indonesia bagian perdesaan dengan jumlah penduduk miskin hampir mencapai 17,09% di Maret 2017 dan pada September 2017 dengan jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 16.310%.

Walaupun disetiap tahunnya penduduk miskin yang berada di pedesaan mengalami penurunan tingkat kemiskinannya seharusnya pihak pemerintah lebih memperhatikan penduduk yang berada di pedesaan, agar tingkat kemiskinan dapat dikatakan stabil dengan penduduk miskin yang berada diperkotaan. Dapat dikatakan jumlah penduduk miskin yang berada di pedesaan mengalami jumlah yang paling besar dikarenakan jauh dari perhatiannya pihak pemerintah, transportasi dan infrastruktur antara kota dan desa cukup dikatakan tidak memadai sehingga barang-barang yang dibawak dari kota kedesa mengalami peningkatan harga yang sangat mahal.

#### **4.4 Analisis Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Indonesia**

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatiakn adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun, pada kenyataan meski jumlah penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan justru meningkat. Berikut Indeks Kedalam Kemiskinan di Indonesia yang disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi**  
**Tahun 2013-2017**



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Jika dilihat dari tabel 4.5 diatas, dapat dilihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan indonesia mengalami penurunan. Pada Maret 2017 indeks kedalaman kemiskinan sebanyak 1,83% dan di September 2017 jumlah kedalaman kemiskinan di Indonesia sebanyak 1,79%.

**Tabel 4.6**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Provinsi**  
**Tahun 2013-2017**

Provinsi	Perkotaan+perdesaan									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2	Sem1	Sem2
<b>Aceh</b>	3.13	3.20	2.91	3.14	3.10	3.11	3.48	3.06	2.98	2.92
<b>Sumut</b>	1.54	1.72	1.47	1.71	1.65	1.89	1.77	1.96	1.71	1.50
<b>SumBar</b>	1.01	1.27	0.94	0.75	0.98	1.26	1.10	1.12	1	0.99
<b>Riau</b>	1.18	1.18	1.01	1.20	1.38	1.45	1.36	1.36	1.32	0.96
<b>Jambi</b>	0.99	1.12	1.05	1.12	1.42	1.60	1.47	1.42	1.28	0.99

Sumsel	2.08	2.49	2.25	2.41	2.46	1.88	2.02	1.96	2.24	2.40
Bengkulu	3	3.24	2.78	2.85	3.48	3.63	3.14	2.79	2.85	2.76
Lampung	2.27	2.23	2.23	2.30	2.36	2.36	2.63	1.92	2.16	2.11
Kep.B.Belitung	0.54	0.62	0.73	0.60	0.67	0.90	0.67	0.75	0.49	0.56
Kep.Riau	0.69	1.02	0.94	0.74	0.97	0.86	0.89	0.71	0.97	1.18
Jakarta	0.63	0.39	0.39	0.60	0.52	0.27	0.46	0.43	0.49	0.61
Jawa Barat	1.32	1.65	1.52	1.39	1.63	1.67	1.49	1.28	1.45	1.39
Jawa Tengah	2.21	2.37	2.25	2.09	2.44	2.17	2.37	2.12	2.21	2.11
Yogyakarta	2.40	2.13	2.19	2.35	2.93	2.32	2.30	1.75	2.19	2.09
Jawa Timur	1.84	2.07	1.85	1.86	2.06	2.13	1.99	1.95	1.87	2.09
Banten	0.70	1.02	0.83	0.79	0.94	0.90	0.80	0.76	0.86	0.78
Bali	0.47	0.70	0.42	0.86	0.66	1.13	0.51	0.53	0.68	0.55
NTB	2.74	2.72	2.56	2.92	3.25	2.72	3	2.63	3.13	2.63
<b>NTT</b>	<b>3.39</b>	<b>3.04</b>	<b>3.34</b>	<b>3.25</b>	<b>4.06</b>	<b>4.62</b>	<b>4.69</b>	<b>3.83</b>	<b>4.34</b>	<b>4.16</b>
KalBar	1.19	1.30	0.98	1.26	1.29	1.09	1.30	1.13	1.23	1.02
KalTeng	0.86	0.61	0.75	0.97	0.89	1.02	0.86	0.65	0.84	0.84
KalSel	0.53	1.25	0.63	0.65	0.74	0.98	0.71	0.69	0.72	0.74
KalTim	0.83	1.25	1.08	0.79	0.90	0.69	1.04	0.81	0.89	0.87
KalUt	-	-	-	-	0.79	0.70	0.78	0.88	1.21	1.32
SulUt	1.18	1.16	1.21	1.28	1.34	1.54	1.53	1.38	1.37	1.30
SulTeng	3.09	2.28	2.18	2.11	2.52	2.37	2.72	2.28	2.55	2.80
SulSel	1.67	1.65	1.56	1.41	1.69	1.58	1.83	1.53	1.72	1.92
SulTenggara	2.12	1.83	1.99	2.09	2.64	2.05	2.76	1.98	1.87	2.09
Gorontalo	3.18	3.22	3.29	3.13	3.97	3.04	4.12	2.79	3.68	3.31
SulBar	1.89	1.30	1.44	1.94	1.93	1.54	1.95	1.85	1.88	1.81
<b>Maluku</b>	<b>3.88</b>	<b>3.52</b>	<b>3.80</b>	<b>4.11</b>	<b>3.52</b>	<b>4.79</b>	<b>3.63</b>	<b>3.76</b>	<b>3.50</b>	<b>3.41</b>
Maluku Utara	0.78	0.89	1.10	1.16	0.70	1.15	0.73	0.92	0.81	0.81
<b>Papua Barat</b>	<b>6.35</b>	<b>5.89</b>	<b>6.20</b>	<b>5.92</b>	<b>6.24</b>	<b>5.29</b>	<b>7.21</b>	<b>6.28</b>	<b>6.74</b>	<b>7.41</b>
Papua	6.89	6.56	6.84	6.42	8.82	0.85	9.37	7.44	7.50	1.79

Indonesia	1.75	1.89	1.75	1.75	1.97	1.84	1.94	1.74	1.83	1.79
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

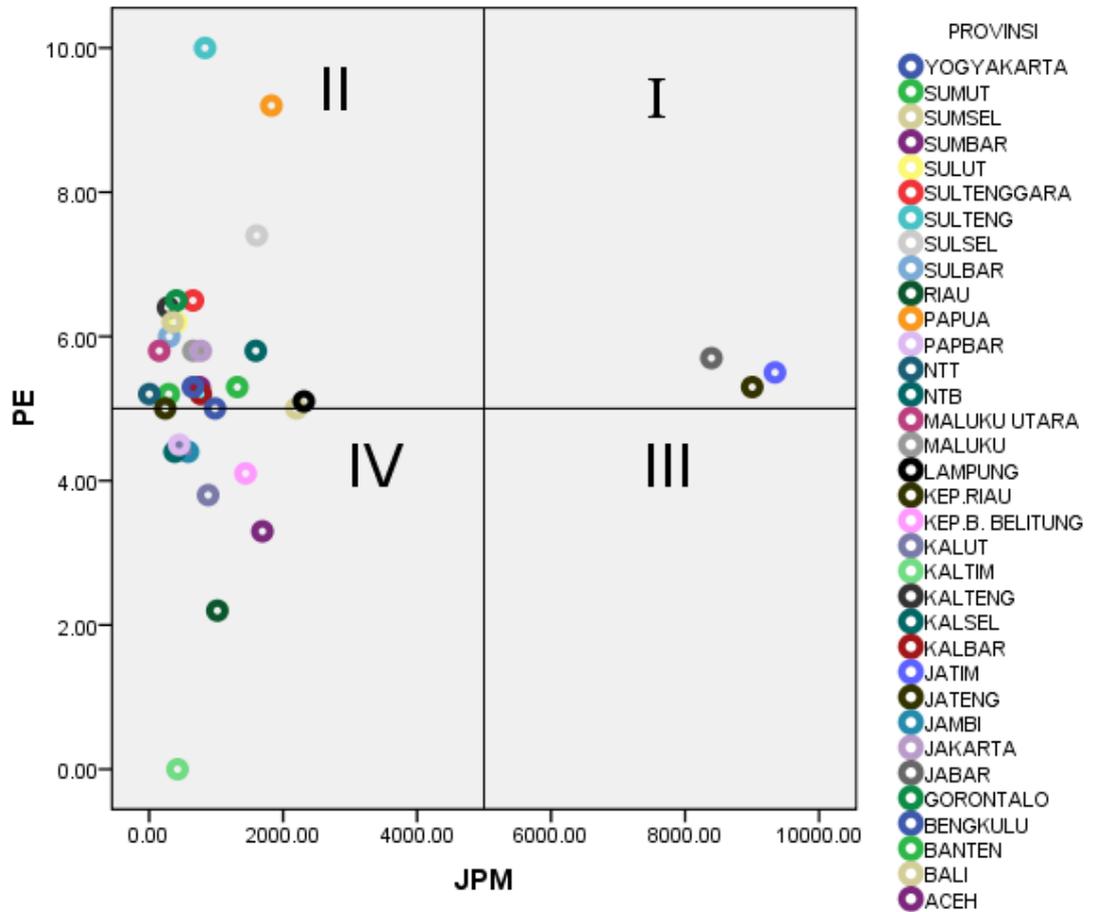
*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)*

Dari tabel 4.5 diatas dapat lihat bahwa tingkat indeks kedalaman kemiskinan di Indonesia tertinggi berada di provinsi NTT, Maluku, dan Papua Barat. Di papua bareat tahun 2017 jumlah penduduk miskin (penduduk yang berda di garis kemiskinan) mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat mencatat orang miskin di Provinsi tersebut pada bulan Maret 2017 naik 22,38 ribu jiwa (25,10) dan secara persentase ,mengalami kenaikan sebesar 0,22%.

Indeks kedalaamn kemiskinan maret 2017 sebesar 6,74%. Angka ini mengalami kenaikan dari September 2016 (6,28). Kenaikan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,47% mengindikasikan pendapatan perkapita dari penduduk miskin tidak meningkat signifikan dan tidak diimbangi dengan laju kenaikan garis kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa gap pendapatahn perkapita antar sesama penduduk miskin semakin melebar.

## 4.5 Analisis Tipologi Klassen

**Gambar 4.6**  
**Tipologi Klassen**



Dari hasil analisis Tipologi Klassen pada gambar 4.6 dengan menggunakan indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Indonesia, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut dengan klasifikasi dalam 4 kuadrat yaitu:

1. Kuadrat I (daerah yang maju dan tumbuh dengan pesat)

Daerah yang termasuk dalam kategori kuadrat satu yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tiga Provinsi tersebut memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin lebih tinggi dari tingkat Provinsi lainnya. Jawa Timur memiliki rata-rata pertumbuhan

ekonomi sebesar 5,5% dan jumlah penduduk miskin sebesar 9.341,83 juta jiwa. Jawa Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 dan jumlah penduduk miskin sebesar 9.000,64 juta jiwa. Dan yang terakhir provinsi Jawa Barat dengan memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,7 dan dengan jumlah penduduk miskin sebesar 8.392,44 juta jiwa. Tiga provinsi yang termasuk dalam kategori daerah kuadrat satu ini merupakan daerah yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pemerintah, memiliki fasilitas umum yang memadai dalam berbagai seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta sarana dan prasarana dalam menunjang kelancarannya jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.

2. Kuadrat II (daerah cepat maju tapi tertekan)

Pada kuadrat II terdapat provinsi Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Papua, NTT, NTB, Maluku Utara, Maluku, Lampung, Kep. Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jakarta, Gorontalo, Bengkulu, Banten, Bali. Ciri-ciri umum daerah yang termasuk dalam kuadrat ini adalah memiliki potensi yang dapat menjadi nilai tambah dalam memperoleh pendapatan per kapita wilayah dengan tingkat aksesibilitas cukup tinggi yang ditawarkan di provinsi masing-masing agar dapat mendorong masing-masing provinsi agar menjadi daerah yang maju di provinsi tersebut.

3. Kuadrat III (daerah yang dapat berkembang cepat)

Pada kuadrat III tidak terdapat daerah atau provinsi yang masuk dalam kategori kuadrat III atau daerah yang dapat berkembang cepat.

4. Kuadrat IV (daerah relatif tertinggal)

Pada kuadrat IV terdapat provinsi riau, Papua Barat, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Aceh. Beberapa provinsi yang terdapat di kategori IV ini berarti pemerataan pembangunan yang terjadi diprovinsi tersebut masih mengalami kendala. Hambatan aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan maupun sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi serta fasilitas umum masih belum merata. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya kebijakan pemerataan pembangunan yang kuat dari pemerintah daerah, dengan cara mengarahkan investasi pemerintah maupun swasta tidak hanya kepada daerah-daerah yang maju saja serta membantu pengembangan sumber daya yang dimiliki setiap daerah tersebut.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian mengenai analisis karakteristik kemiskinan di Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

### **5.2 Analisis perkembangan penduduk miskin di Indonesia tahun 2013 – 2017**

Jika dilihat dari perkembangan penduduk miskin di Indonesia selama kurun waktu 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2013-2017 penduduk miskin yang berada di Indonesia terus mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Indonesia semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya.

Jumlah penduduk miskin yang dimiliki Indonesia dengan kemiskinan relatif terdapat di provinsi Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo. Dan kemiskinan absolut terdapat di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat

### **5.3 Analisis karakteristik kemiskinan di Indonesia.**

Analisis karakteristik kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari karakteristik kemiskinan jumlah penduduk perdesaan/perkotaan. Dimana jumlah penduduk miskin yang berada di perdesaan dengan jumlah yang tinggi dibandingkan perkotaan.

### **5.4 Analisis tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia.**

Deskriptif tingkat kedalaman kemiskinan di Indonesia merupakan suatu kemiskinan yang dilihat dari tingkat kedalaman suatu wilayah atau daerah dengan kedalaman kemiskinan. Kedalaman kemiskinan yang ada di Indonesia terdapat di provinsi NTT, Maluku, dan Papua Barat. Provinsi tersebut memiliki

jumlah tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia di bandingkan provinsi yang lainnya.

### **5.5 Analisis Tipologi Klassen.**

Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dengan menggunakan indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Indonesia, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut dengan klasifikasi dalam 4 kuadrat.

Kuadrat I yaitu daerah yang maju dan tumbuh dengan pesat provinsi yang masuk dalam kategori kuadrat I adalah daerah atau provinsi yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pemerintah, memiliki fasilitas umum yang memadai dalam berbagai seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi serta sarana dan prasarana dalam menunjang kelancarannya jika dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Kuadrat II yaitu daerah cepat maju tapi tertekan. Provinsi yang masuk dalam kategori II ini adalah memiliki potensi yang dapat menjadi nilai tambah dalam memperoleh pendapatan per kapita wilayah dengan tingkat aksesibilitas cukup tinggi yang ditawarkan di provinsi masing-masing agar dapat mendorong masing-masing provinsi agar menjadi daerah yang maju di provinsi tersebut.

Kuadrat III yaitu daerah yang masih dapat berkembang pesat yaitu daerah yang dapat memberikan perhatian pemerintah yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi agar dapat meningkat. Sehingga pada tahap selanjutnya daerah ini masih dapat terus berkembang maju dengan mengembangkan potensi

yang dimiliki dan didukung oleh peningkatan kualitas dari segala bidang dalam mencapai tujuan pembangunan yang merata.

Kuadrat IV yaitu daerah relatif tertinggal yaitu pemerataan pembangunan yang terjadi diprovinsi tersebut masih mengalami kendala. Hambatan aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan maupun sarana dan prasarana penunjang aktifitas ekonomi serta fasilitas umum masih belum merata. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya kebijakan pemerataan pembangunan yang kuat dari pemerintah daerah, dengan cara mengarahkan investasi pemerintah maupun swasta tidak hanya kepada daerah-daerah yang maju saja serta membantu pengembangan sumber daya yang dimiliki setiap daerah tersebut.

## **5.6 Saran**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah:

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan kemiskinan yang ada di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.
2. Bagi pemerintah Indonesia, sebagai acuan dalam mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia.
3. Dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia, pemerintah hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi sumber daya manusia maka akan mengurangi jumlah penduduk miskin dan pemerintah dapat melakukan upaya seperti peningkatan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

4. Selain itu diharapkan pemerintah Indonesia dan pemerintahan daerah dapat membuka lapangan pekerjaan guna menyerap jumlah tenaga kerja sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dan dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga jumlah pengangguran semakin berkurang maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan di Indonesia dan daerah-daerah yang ada di Indonesia pula.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Jundi, Musa. (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia. Universitas Diponegoro.
- Arsyad (1999, 58). Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPF. Yogyakarta
- Bps.www.bps.co.id
- Caroline Margaretha dan Santika Djamiluddin. 2014. *Analisis Karakteristik Rumah Tangga Miskin Antar Wilayah di Indonesia*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Djojohadikusumo, S. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi: dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan.LP3ES. Jakarta
- Dumairy (1996) Perekonomian Indonesia. Jakarta. 1996.
- Febriaty Hastina dan Nurwani. *Pengaruh pendapatan perkapita, investasi dan inflasi terhadap kemiskinan Sumatera Utara*, Vol 3 No. 2 2017.
- Indonesia.Investment.com
- Jhingan, M.L. 2000. *Kebutuhan Daerah dalam rangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Walam Alumni LPEM.FEUI, Vol III No.5, Juni 2002
- Lps.mudah.com/2017/D3/indikator.keb.Pembangunan.Ekonomi
- Poerwadarminta (1976). Kamus umum bahasa indonesia, Pn balai pustaka
- Kuncoro, Mudrajad (2000). *Ekonomi pembangunan' teori, masalah dan kebijakan* (1 st ed) Yogyakarta
- Rahayu, Sri (2003) *Masalah Kependudukan di Negara Indonesia*. <http://library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-sri%20rahayu.pdf>
- Sukirno, Sadono (2003), *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta; PT. Raja. Grafindon persada
- Sukirno, Sadono (2006), *Ekonomi Pembangunan (proses, masalah, dan dasar kebijakan)* Jakarta : fakultas ekonomi UI
- Sukirno, Sadono (1985), *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Kebijakan*, LPFE.UI. Jakarta

Sukirno, Sadono (2010). *Makro Ekonomi. Teori Pengantar*. Edisi ketiga. PT. Raja Grasindo. Jakarta

Suryana, 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan edisi Pertama*, Jakarta: Salemba empat

Sangadja, Sanadjihitu Totok Wahyu Abadi, Luluk Fauziah. ***Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo*** . *mimbar*, Volume, 31, no.2 (Desember, 2015):495-506

Sugiyarto, Jangkung Handoyo Mulyo, Rosalia Natalia Selekty. *Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro*. *Agro Ekonomi* Vol. 26/No. 2, Desember 2015

Suselo, Sei Liani, Tarsidin. Oktober 2008. *Kemiskinan di Indonesia : Pengaruh Pertumbuhan dan Perubahan Struktur Ekonomi*.

Tambunan, Tulus T.H. (2001). *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Todaro dan Smith (2006), *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Kencana

Todaro, Michael P. 2000. ( Penerjemah : Drs. Haris Munandar ). *Pembangunan Ekonomi di Dunia* Ketiga Edisi Ketujuh. Jilid satu. Erlangga : Jakarta.

Todaro.M.P. dan Smith Stephen.C. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan. Jilid Kedua*. Jakarta:Erlangga.

Romadhani, Wahyudi. 2008. *Pemetaan Karakteristik dan Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Bogor*. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

Solow, Robert, 1956. *A contribution to the theory of economic growth*. *Quarterly Journal of economics* (the MIT Press) 70 (1): 65-94

Wongdesmiwati (2009), *Pertumbuhan Ekonomi dan Persentasan di Indonesia*. Analisis ekonometrika

[Www.worldbank.co.id](http://www.worldbank.co.id)